

**PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM LAPORAN
KEUANGAN PADA BUMDesma MAYANG SEJAHTERA
DI KECAMATAN MAYANG JEMBER**

SKRIPSI



NIM: 204105030118

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM LAPORAN
KEUANGAN PADA BUMDesma MAYANG SEJAHTERA
DI KECAMATAN MAYANG JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



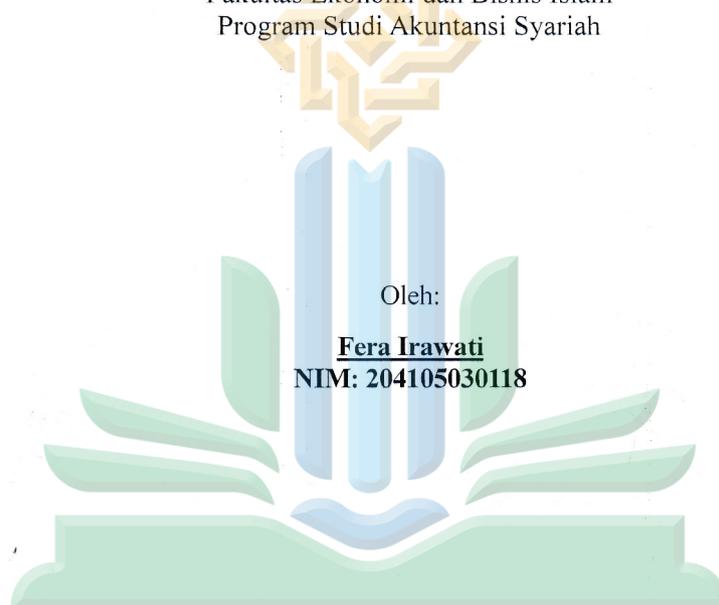
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
Fera Irawati
NIM: 204105030118
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM LAPORAN
KEUANGAN PADA BUMDesma MAYANG SEJAHTERA
DI KECAMATAN MAYANG JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:
Fera Irawati
NIM: 204105030118

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
NIP. 197107272002121003

**PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM LAPORAN
KEUANGAN PADA BUMDesma MAYANG SEJAHTERA
DI KECAMATAN MAYANG JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I.
NIP. 1928209222009012005

Sekretaris



Siti Alfiah, S.E.I., M.E.
NIP. 198701282023212028

4 Anggota:

1. Dr. Hj. Nurul Widyawati I. R., S.Sos., M.Si. ()
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



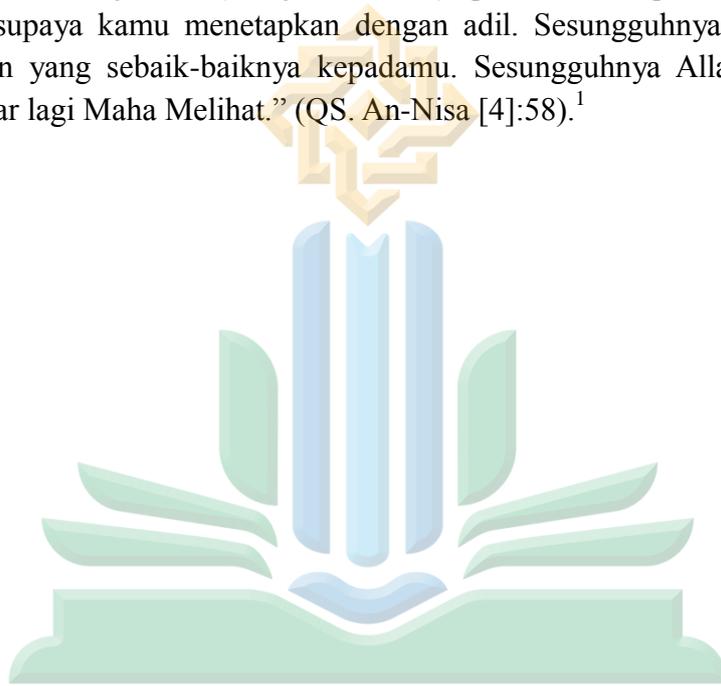
Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa [4]:58).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Fattah dan Terjemahannya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), 45.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini bisa terlaksanakan. Sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Teruntuk Ibu dan Bapak saya tercinta Elmiyah dan Baihaki, selaku Orang Tua yang sangat saya cintai, yang selalu mendoakan saya untuk meraih kesuksesan, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa dalam hidup saya, dan terima kasih selalu mengarahkan hal baik dan menasehati saya serta mendukung potensi yang saya punya sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan sampai selesai dan lulus.
2. Teruntuk Kakek dan Nenek saya Poniman dan Hafifah, dan juga Kakak saya Feri Irawan terima kasih sudah memberikan dukungan dan doa kepada saya.
3. Teruntuk Sahabat-sahabat tercintaku terima kasih sudah banyak membantu saya selama ini dan terima kasih sudah memberikan dukungan dan menjadi pendengar terbaik saya.
4. Teruntuk Bapak Denie Ardi selaku Direktur BUMDesma Mayang Sejahtera terima kasih telah mengizinkan dan membantu saya untuk melakukan penelitian.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur saya haturkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman permusuhan menuju zaman yang penuh dengan nuansa persaudaraan seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Namun, dengan pertolongan Allah SWT, serta semangat dan doa dari semua pihak, skripsi ini berhasil diselesaikan. Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M., CPE. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan semangat, bimbingan, pengarahan, dan ilmu yang diberikan sehingga skripsi ini mampu terselesaikan.
6. Bapak Daud Rhosyidy, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing mulai dari awal masuk kuliah sampai saat ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berkenan memberikan ilmu dan wawasan untuk penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmat kepada semua pihak yang tentunya telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembacanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 April 2024
Penulis

Fera Irawati
NIM. 20410503011

ABSTRAK

Fera Irawati, Moch. Chotib 2024: *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Pada BUMDesma Mayang Sejahtera di Kecamatan Mayang Jember.*

Kata Kunci: Akuntabilitas, Laporan Keuangan, BUMDesma Mayang Sejahtera.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan dana. BUMDesma Mayang Sejahtera berperan penting dalam mengelola dana desa untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Mayang. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera adalah untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera? 2) Apa kendala dan solusi dalam penerapan prinsip akuntabilitas laporan keuangan pada BUMDesma Mayang Sejahtera?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera. 2) Untuk mengetahui apa kendala dan solusi dalam penerapan prinsip akuntabilitas laporan keuangan pada Bumdesma Mayang Sejahtera.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di BUMDesma Mayang Sejahtera. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDesma Mayang Sejahtera sudah sesuai dengan ketiga indikator akuntabilitas finansial. Laporan keuangan yang dibuat BUMDesma Mayang Sejahtera sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya, laporan pertanggung jawaban yang berisi laporan keuangan dan laporan kegiatan operasional dalam satu tahun sudah diungkapkan ke publik melalui forum MAD, serta laporan keuangan yang dibuat sudah mengikuti standar dari dinas PMD. Sehingga hal tersebut dapat menunjukkan bahwa BUMDesma Mayang Sejahtera sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam laporannya. 2) BUMDesma Mayang Sejahtera tidak mengalami kendala atau hambatan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas pada laporan keuangannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	29
1. Teori Agensi.....	29

2. Akuntabilitas.....	32
3. Laporan Keuangan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-Tahap penelitian.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	50
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	50
1. Sejarah BUMDesma Mayang Sejahtera.....	50
2. Profil BUMDesma Mayang Sejahtera.....	52
3. Visi dan Misi BUMDesma Mayang Sejahtera.....	52
4. Struktur Organisasi BUMDesma Mayang Sejahtera.....	53
5. Unit Usaha BUMDesma Mayang Sejahtera.....	59
B. Penyajian Data dan Analisis.....	61
1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera.....	61
2. Kendala dan Solusi dalam Penerapan Prinsip Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada BUMDesma Mayang Sejahtera.....	83

C. Pembahasan Temuan	87
1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera	88
2. Kendala dan Solusi dalam Penerapan Prinsip Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada BUMDesma Mayang Sejahtera	93
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matrik Penelitian	
Lampiran 2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	
Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
Lampiran 6. Jurnal Kegiatan Penelitian	
Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian	
Lampiran 8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Bimbingan	
Lampiran 10. Biodata	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Kelompok Nasabah BUMDesma di Kabupaten Jember .	6
Tabel 2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1 Laporan Operasional BUMDesma Mayang Sejahtera Januari s/d Desember 2023	83
Tabel 4.2 Analisis Kendala dalam Penerapan Akuntabilitas Pada Laporan Keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera	94



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMDesma Mayang Sejahtera	54
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan ilmu akuntansi sektor publik saat ini sangat berkembang pesat di Indonesia. Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta. Akuntansi sektor publik mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu menyiapkan laporan keuangan sektor publik untuk menjalankan akuntansi publik. Laporan keuangan ini dari segi internal organisasi memberikan manfaat untuk alat evaluasi kinerja manajerial dan pengendali atas organisasi. Segi eksternal organisasi, melihat manfaat laporan keuangan untuk mempertanggung jawabkan dihadapan publik serta dasar untuk merumuskan kebijakan atau keputusan.²

Dalam tatanan Negara Republik Indonesia, akuntansi sektor publik juga mempunyai peranan penting di lingkungan desa untuk mewujudkan kemandirian fungsi desa dalam konteks otonomi daerah. Hal ini yang diperlukan kesiapan untuk mewujudkan hal tersebut adalah aspek sosial, politik dan ekonomi desa sendiri, termasuk kelebagaannya. Salah satu contoh kelembagaan di desa yaitu BUMDesma yang dimiliki oleh desa itu

² Ratih Qadarti Anjilni, Asih Handayani, dan Adhitya Putri Pratiwi Pratiwi, *Akuntansi Sektor Publik* (Banten: UNPAM PRESS, 2023), 2.

tersendiri. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.³ Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa.

BUMDesma merupakan suatu Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh lebih dari satu desa dan dilakukan secara bersama-sama. Pembentukan BUMDesma dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDES. Pendirian, penggabungan, peleburan, dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) ini merupakan salah satu upaya pemerintah guna menerapkan implementasi kebijakan yang dikhususkan dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat pra-sejahtera di desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama. BUMDES/BUMDesma secara teknis merupakan suatu organisasi yang berfungsi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain untuk meningkatkan PADes, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah organisasi usaha desa yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan

³ Maryunani dan Axellina Muara Setyanti, *Ekonomi Perdesaan* (Malang: UB Press, 2020), 1.

⁴ Nabilla Apriliany, Cantik Prameswari, dan Dra Kushdanajani, "Analisis Badan Usaha Milik Desa Bersama Dalam Perspektif Good Governance (Studi Kasus Bumdesma Mandiri Sejahtera Pati)", *Journal of Politic dan Government Studies* 11, no. 3 (2022): 5.

pemerintahan desa, sebagai sebuah organisasi yang dibuat untuk meningkatkan perekonomian di desa dan dibuat berdasarkan kebutuhan, serta potensi desa. Selain itu, pemerintah memberi peluang kepada desa-desa untuk membentuk kerjasama antara BUMDES satu dengan BUMDES lainnya disamping BUMDES yang dibentuk oleh masing-masing desa yang kemudian dikenal dengan istilah BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama).⁵

Tujuan didirikannya BUMDesma adalah sebagai penggerak tumbuhnya usaha ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya, pemanfaatan dan pengoptimalan kekayaan desa guna kesejahteraan desa, pengembangan usaha-usaha masyarakat pedesaan dalam mengelola potensi yang ada di desa, peningkatan perencanaan kerjasama usaha yang ada di desa dengan pihak ketiga, upaya mewujudkan kesempatan dan relasi pasar yang memotivasi kebutuhan pelayanan masyarakat pedesaan, pengembangan kualitas pelayanan dasar pedesaan, pewujudan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan serta pendapatan asli desa.⁶

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh

⁵ Badrudin Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Kerjasama Antar Desa di Badan Usaha Milik Desa Bersama (Studi Kasus BUMDesma Kampung Batik di Desa Klampar Kecamatan Propo Kab. Pamekasan)", *Parlindungan Arief Nasution Publika* 11, no. 2 (2023): 1917.

⁶ Apriliany, Prameswari, dan Kushandajani, "Analisis Badan Usaha Milik Desa Bersama Dalam Perspektif *Good Governance* (Studi Kasus Bumdesma Mandiri Sejahtera Pati)", *Journal of Politic dan Government Studies* 11, no. 3 (2022): 6.

pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh kegiatan agen terhadap prinsipal. Termasuk dalam pengertian tersebut, akuntabilitas memiliki peran penting untuk menekan penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya bagi kepentingan publik.⁷

Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola keuangan pemerintah, faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah tersebut meliputi faktor kesesuaian atas standar akuntansi yang berlaku, kecukupan pengungkapan, kepatuhan pada perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan, budaya organisasi, serta kompetensi sumberdaya manusia.⁸

Penerapan prinsip akuntabilitas pada BUMDesma harus memenuhi asas akuntabel dalam mengelola keuangan desa. Akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah desa harus bisa mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima dan dikeluarkan untuk pembiayaan dan pembangunan kepada berbagai pihak-pihak yang berkepentingan.⁹ Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

⁷ Muhammad Nur Aziiz, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa," *Jurnal Akuntansi Aktual* 6, no. 2 (2019): 334.

⁸ Aziiz, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa," 335.

⁹ Rimi Gusliana Mais dan Lini Palindri, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi Dan Governance* 1, no.1 (2020): 63.

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban dapat menjadi tujuan yaitu mencerminkan nilai-nilai demokratis serta dapat pula menjadi cara menuju pengembangan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Pertanggungjawaban adalah kunci untuk menjamin bahwa kekuasaan ini digunakan secara layak dan sesuai dengan kepentingan publik.¹⁰

Laporan keuangan adalah laporan yang mencerminkan keadaan keuangan sebagai dampak dari kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode laporan. Dalam laporan keuangan yang disusun umumnya tergambar kondisi keuangan lembaga yang meliputi aset lembaga baik aset tetap maupun aset tidak tetap. Kewajiban lembaga yang meliputi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, modal perusahaan serta pendapatan dan pengeluaran operasional perusahaan. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban manajemen sebagai bahan pertanggung jawaban kepada pemilik, namun lebih dari itu, penyusunan laporan keuangan juga memiliki fungsi dan tujuan yang lebih luas.¹¹

BUMDesma merupakan salah satu entitas yang memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan mengenai pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut peneliti

¹⁰ Ichsan Muhajir, "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no.1 (2019): 4-5.

¹¹ Agung Anggoro Seto dkk, *Analisis Laporan Keuangan* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 1-2.

sajikan jumlah kelompok nasabah pada beberapa BUMDesma di Kabupaten Jember.

Tabel 1.1
Jumlah Kelompok Nasabah BUMDesma di Kabupaten Jember

No	Kecamatan	Nama BUMDesma	Jumlah Kelompok
1	Mayang	Mayang Sejahtera	154
2	Kalisat	Kalisat Sejahtera	148
3	Pakusari	Karya Dharma	142

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil wawancara.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kelompok pada BUMDesma Mayang Sejahtera lebih banyak dibandingkan dengan BUMDesma Kalisat Sejahtera dan BUMDesma Karya Dharma. Adanya jumlah kelompok nasabah yang lebih banyak menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BUMDesma Mayang Sejahtera karena terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang dimaksud adalah mayoritas masyarakat di Kecamatan Mayang masih belum memahami realisasi dari penggunaan dana desa yang dijalankan oleh pihak pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera. Sehingga hal tersebut masih ditemukan kurang adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dana desa.¹²

Selain itu, masyarakat di Kecamatan Mayang masih belum mengerti apa pentingnya pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan dana desa. Masyarakat pun belum mengerti bagaimana dana itu digunakan dan bagaimana dana itu dibelanjakan, karena di dalam MAD (Musyawarah Antar Desa) belum di ungkapkan secara terperinci. Sehingga sebagai masyarakat

¹² Observasi di Kecamatan Mayang, 25 Oktober 2023.

yang tertib membayar pajak, semestinya masyarakat juga ingin melihat dan mengetahui terkait rincian dana yang mereka bayarkan melalui pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di BUMDesma Mayang Sejahtera. BUMDesma Mayang Sejahtera adalah transformasi dari program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Upaya pemerintah dalam membentuk program PNPM adalah untuk mendorong penurunan kemiskinan dan pengangguran di Kecamatan Mayang. BUMDesma Mayang Sejahtera memainkan peranan penting dalam mengelola dana desa, yang mana dana tersebut digunakan untuk pembangunan ekonomi dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Mayang. Berdasarkan hal tersebut penting untuk memastikan bahwa BUMDesma Mayang Sejahtera telah mengelola keuangannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan di BUMDesma Mayang tersebut. Mengetahui sejauh mana BUMDesma Mayang Sejahtera dalam menerapkan prinsip akuntabilitas pada laporan keuangannya, maka laporan keuangan yang dihasilkan nantinya dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, karena laporan keuangan tersebut telah menunjukkan bahwa BUMDesma Mayang Sejahtera telah mengelola dana desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi mendalam tentang bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan hal ini, penulis meneliti dengan judul “Penerapan Prinsip

Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Pada BUMDesma Mayang Sejahtera di Kecamatan Mayang Jember.”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan di Bumdesma Mayang Sejahtera?
2. Apa kendala dan solusi dalam penerapan prinsip akuntabilitas laporan keuangan pada Bumdesma?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan di Bumdesma Mayang Sejahtera.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan prinsip akuntabilitas laporan keuangan pada Bumdesma.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan pada Bumdesma Mayang Sejahtera di Kecamatan Mayang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan pada bidang ilmu Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berkepentingan, seperti:

A. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk peneliti pada khususnya dalam mengembangkan kemampuan dalam membuat karya ilmiah dan menambah pengalaman maupun wawasan peneliti terkait Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan.

B. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah koleksi literasi karya tulis ilmiah di perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkait Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan.

C. Bagi Pihak Bumdesma dan Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi sekaligus tambahan wawasan akan gambaran mengenai implementasi prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan.

D. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sumber informasi untuk menambah wawasan dan gambaran terkait Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan.

E. Definisi Istilah

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.¹³ Prinsip akuntabilitas menetapkan bahwa sesungguhnya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui birokrasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.¹⁴ Hal ini mencakup tanggungjawab untuk memberikan laporan dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi bagian dari tugasnya. Pemberi amanah atau prinsipal memiliki hak dan kewajiban finansial untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanah yang telah dipercayakan. Adanya akuntabilitas, maka akan tercipta transparansi dan kepercayaan antara pihak pemegang amanah dan pemberi amanah dalam menjalankan hubungan kerja atau tugas yang diberikan.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.¹⁵ Artinya laporan keuangan merupakan suatu bentuk informasi yang secara rinci menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Melalui laporan tersebut, dapat ditemukan data yang

¹³ Mikael Edowai, Herminawati Abubakar, and Miah Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Sulawesi Selatan: ISBN, 2021), 16-17.

¹⁴ Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura," *Jurnal Ekonomi* 2, no. 1 (2019): 310.

¹⁵ Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan* (Bandung: ALFABETA, 2017), 22.

mencerminkan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Informasi ini tidak hanya mencakup gambaran umum tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana perusahaan telah mencapai tujuan keuangan dan operasionalnya. Oleh karena itu, laporan keuangan menjadi instrumen kunci dalam mengevaluasi kesehatan finansial dan kemajuan suatu perusahaan.

3. BUMDesma

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan didirikan BUMDES dan BUMDesma adalah melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bagian yang menjelaskan urutan langkah-langkah pembahasan dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Agar materi yang disampaikan lebih mudah dipahami, peneliti menyediakan penjelasan khusus untuk setiap bab sebagai berikut:

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes/BUMDesma, pasal 1 ayat (1).

BAB I berupa kajian pendahuluan yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II berupa kajian kepustakaan yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III berupa metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berupa penyajian data dan analisis. Bab ini terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan.

Bab V berupa penutup yang mencakup tentang kesimpulan dan saran. Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan, dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memberikan landasan teori yang dapat mendukung dan memfasilitasi penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu juga dapat berperan sebagai panduan bagi penulis atau peneliti dalam melakukan penelitian, serta dapat memperkaya kerangka teori yang digunakan. Meskipun tidak ditemukan penelitian dengan judul yang serupa, berikut beberapa penelitian terdahulu dari berbagai jurnal yang digunakan sebagai referensi untuk memperkaya penelitian ini dan menyediakan materi yang diperlukan. Di bawah ini merupakan beberapa penelitian sebelumnya dari berbagai jurnal yang relevan dengan topik yang dibahas oleh penulis.

1. Lasiati, *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Pada BUMDesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.*

Penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat BUMDesma Sejahtera Mandiri sudah sesuai dengan 3 kriteria akuntabilitas, yaitu integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa BUMDesma Sejahtera Mandiri sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangannya. Namun, di BUMDesma Sejahtera Mandiri terdapat kendala dalam menerapkan prinsip akuntabilitasnya. Kendala tersebut adalah terdapat keterbatasan sumber

daya, dimana tenaga kerja masih terbatas dan ada yang kurang memahami dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Sehingga BUMDesma Sejahtera Mandiri terkadang mengalami keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangannya. Solusi yang dilakukan BUMDesma Sejahtera Mandiri dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan cara melatih skill dari anggota tersebut dan memberikan seminar dengan tema penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan serta prinsip-prinsip pertanggung jawaban pihak karyawan terhadap kinerjanya.¹⁷

Kesamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya sama-sama membahas tentang prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes/BUMDesma, serta metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada hasil penelitian. Hasil penelitian pada penelitian terdahulu terdapat kendala dalam penerapan prinsip akuntabilitas laporan keuangannya, sedangkan pada penelitian peneliti tidak terdapat kendala dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangannya.

2. Angelina Trimurti Rambu Ana dan Linda Lomi Ga, *Analisis Akuntabilitas Dan Transparasi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk)*.

¹⁷ Lasiati, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Pada BUMDesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk" (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2021), 65-80.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk melihat akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan, terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi. Indikator untuk mengukur akuntabilitas adalah integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap Undang-Undang. BUMDes Ina Huk belum menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangannya, karena belum memenuhi indikator-indikator tersebut. Laporan keuangan BUMDes Ina Huk masih sederhana dan belum menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pembuatan laporan keuangan yang benar, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).¹⁸

Kesamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya sama-sama membahas tentang prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes/BUMDesma, serta metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada hasil penelitiannya. Hasil pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa BUMDes Ina Huk belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangannya, sedangkan pada penelitian peneliti menunjukkan bahwa BUMDesma

¹⁸ Angelina Trimurti Rambu Ana dan Linda Lomi Ga, "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk)," *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas* 9, no. 1 (Maret 2021): 69-71.

Mayang Sejahtera sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangannya.

3. Sahila Izza Afkarina, *Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid Baitul Muttaqin Dusun Seloagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Laporan keuangan masjid baitul muttaqin dibuat dengan cara yang sederhana, yaitu hanya berupa kas masuk dan kas keluar saja. 2) Transparansi keuangan di masjid baitul muttaqin sudah jelas karena data laporan keuangan yang disajikan asli, rinci, dan terbuka untuk masyarakat dan jamaah masjid. Namun, bentuk transparansi yang ada masih belum mengikuti Interpretasi Standar Akuntansi (ISAK) 35, karena takmir masjid tidak terlalu memahami teori-teori laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman. 3) Akuntabilitas pengelolaan keuangan di masjid baitul muttaqin sudah baik, karena pihak pengelola masjid sudah melaporkan, mengungkapkan, dan mengelola segala kegiatan dan penggunaan sumber daya publik dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya rapat pengelolaan keuangan setiap tahun dan laporan harian kepada ketua umum takmir masjid. Selain itu, setiap penerimaan dan pengeluaran dilaporkan secara berkala, yaitu pada saat shalat jumat dan pada saat hari besar islam.¹⁹

¹⁹ Sahila Izza Afkarina, "Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid Baitul Muttaqin Dusun Seloagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 54-71.

Kesamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya sama-sama menganalisis tentang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada jenis penelitian. Pada penelitian terdahulu jenis penelitiannya menggunakan paradigma interpretif sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan kualitatif deskriptif. Dan objek penelitiannya, pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah Masjid Baitul Muttaqin, sedangkan objek penelitian peneliti adalah BUMDesma Mayang Sejahtera.

4. Fani Hidayatulloh, *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.*

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Kemiri sudah sesuai dengan peraturan pemerintah desa. Pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan sebagian masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, sampai dengan penyerahan hasil pelaporan. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa Kemiri masih belum maksimal, terutama pada penyampaian informasi berita mengenai fakta yang ada di lapangan ditunjukkan pada

papan informasi maupun data di desa Kemiri yang masih kurang *update*.²⁰

Kesamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya sama-sama menganalisis tentang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada pembahasan akuntabilitas. Penelitian terdahulu membahas tentang penerapan akuntabilitas dalam tahapan pengelolaan dana Desa Kemiri, sedangkan pada penelitian peneliti membahas tentang penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan BUMDesma Mayang Sejahtera..

5. Rukyatul Aini, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 di Masjid Baytul Amal Gebang Panti Jember*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk akuntabilitas pengelola masjid baytul amal adalah dengan cara melakukan pencatatan untuk menyusun laporan keuangannya. Laporan keuangan yang dibuat setiap bulan hanya terdiri tanggal, keterangan, kas masuk, kas keluar, dan saldo. Sedangkan laporan keuangan yang dibuat setiap tahunnya adalah mencatat beberapa kas yang diperoleh dan mencatat beberapa pengeluaran kas masjid. Selain menyusun dan membuat laporan keuangan, bentuk akuntabilitas pengelola masjid baytul amal adalah

²⁰ Fani Hidayatulloh, "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 63-102.

dengan cara menyampaikan laporan keuangan masjid setiap bulannya, dan penyampaian dilakukan ketika selesai sholat jum'at. Ketua ta'mir mengumumkan kepada jamaah sholat jum'at terkait rincian pengeluaran setiap bulan dan rincian pemasukan setiap bulan, serta mengumumkan juga nama donatur yang bershodaqoh ketika ada kegiatan hotmil qur'an. Berdasarkan hal tersebut, pihak pengelola masjid baytul amal telah menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat, serta tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat atau donatur.²¹

Kesamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya sama-sama menganalisis tentang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada penyampaian akuntabilitas. Akuntabilitas dalam penyampaian di penelitian terdahulu yaitu melalui lisan kepada jama'ah pada setiap bulannya di Masjid Baytul Amal, sedangkan akuntabilitas dalam penelitian peneliti penyampaiannya yaitu melalui MAD LPJ di kantor Kecamatan Mayang.

6. Novi Anggraeni, *Analisis Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023)*.

²¹ Rukyatul Aini, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 di Masjid Baytul Amal Gebang Panti Jember" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 41-62.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan dana desa di desa Karang Paiton sudah bisa dikatakan baik dalam menerapkan prinsip transparansi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya proses perencanaan kegiatan yang sudah melibatkan perwakilan masyarakat serta sudah terdapat beberapa media informasi untuk menunjang transparansi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Namun ada beberapa poin yang belum terpenuhi prinsip transparansinya, yaitu perangkat desa Karang Paiton hanya mempublikasikan berupa jumlah dana yang didapat, sedangkan perincian penggunaan dana tersebut tidak dijelaskan. 2) Pemahaman dan penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Karang Paiton bisa dibilang sudah baik. Perangkat Desa Karang Paiton sudah menyediakan laporan pertanggung jawaban yang sesuai dengan peraturan, serta laporan tersebut sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau sesuai dengan yang telah dilakukan. Tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatan masih didapati beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawabannya, seperti beberapa laporan yang terlambat pelaporannya.²²

Kesamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya sama-sama menganalisis tentang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah

²² Novi Anggraeni, "Analisis Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023)" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 69-79.

terletak pada jenis penelitian. Pada penelitian terdahulu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sedangkan pada penelitian peneliti jenis penelitiannya kualitatif dengan jenis penelitian *field research*.

7. Angelina Nadia Saputra, Firdha Ayu Anggraeni, Mitha Dwi Restuti, *Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan di Bumdes Maskumambang*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dialami oleh BUMDes Maskumambang. Kendala tersebut adalah dalam melakukan penentuan harga produk dan laporan keuangan yang disusun tidak mengikuti kriteria standar akuntansi. Selain itu, terdapat program kerja yang belum terlaksana yang mengakibatkan terhambatnya hasil pelaporan laporan keuangan karena belum dapat memberikan informasi yang sesuai. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengelolaan laporan keuangan dinilai kurang akuntabel bagi pihak yang membutuhkan.²³

Kesamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya sama-sama membahas tentang prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes/BUMDesma, serta metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada jenis penelitian. Jenis penelitian pada

²³ Angelina Nadia Saputra, dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan di Bumdes Maskumambang," *Jurnal Pilar* 1, no. 2 (2023): 227-230.

penelitian terdahulu yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus sedangkan pada penelitian peneliti yaitu kualitatif dengan pendekatan *field research*.

8. Shinta Maulydia Sari, *Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Bumdes (Studi Kasus BUMDES KARYA MULYA Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*.

Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, pelaksanaan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya” masih kurang akuntabel. Hal ini dapat dilihat bahwa pengelola telah menyusun laporan keuangan, hanya saja belum melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada publik. Kedua, pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya” juga masih kurang transparan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya akses dokumen yang diberikan kepada publik. Ketiga, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya” meliputi kurangnya Sumber Daya Manusia, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, dan kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pihak desa.²⁴

Kesamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya sama-sama membahas tentang prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes/BUMDesma, serta metode penelitian yang digunakan adalah

²⁴ Shinta Maulydia Sari, “Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Bumdes (Studi Kasus BUMDES KARYA MULYA Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 64-71.

metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada hasil penelitian. Pada penelitian terdahulu hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya” masih kurang akuntabel dan transparan, sedangkan pada penelitian peneliti hasilnya menunjukkan bahwa BUMDesma Mayang Sejahtera sudah akuntabel dan transparan. Dan objek penelitiannya, pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah BUMDes Karya Mulya di Kecamatan Poncokusumo, sedangkan objek penelitian peneliti adalah BUMDesma Mayang Sejahtera di Kecamatan Mayang.

9. Neneng Musyrifatul Amelia dan Muhammad Taufiq Hidayat, *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas di lima desa di Kecamatan Sedati terkait pengelolaan alokasi dana desa telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaannya mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawaban, dan ditandai dengan keterlibatan aktif kepala desa dalam mendampingi perangkat desa dan masyarakat sepanjang proses.²⁵

²⁵ Neneng Musyrifatul Amelia dan Muhammad Taufiq Hidayat, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo,” *JAKA: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing* 5, no. 1 (Mei 2024): 89-93.

Kesamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya sama-sama menganalisis tentang bagaimana menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Namun perbedaannya adalah terletak pada Peraturan Pemerintah jika pada penelitian terdahulu sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 sedangkan Peraturan Pemerintah pada peneliti yaitu PERMENDAGRI Nomor 11 Tahun 2021 dan perbedaan pada objek penelitiannya, yakni pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Sedati. Sedangkan objek penelitiannya peneliti adalah pada laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera.

10. Nurul Afni, Muhammad Su'un, dan Abbas Selong, *Penerapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban sudah memenuhi standar pencatatan keuangan desa seperti yang tercantum dalam laporan APBDesa. Namun masih ada beberapa kendala yang mengakibatkan masih belum optimalnya penerapan akuntabilitas pengelolaan desa di Desa Nisombalia. Kendala tersebut adalah karena keterbatasan sumber

daya, sehingga kadang masih terjadi keterlambatan dalam mengumpulkan laporan di aplikasi sistem keuangan desa (SISKUDES).²⁶

Kesamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya sama-sama menganalisis tentang bagaimana menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Namun perbedaannya adalah terletak pada hasil penelitian. Hasil penelitian pada penelitian terdahulu terdapat kendala dalam penerapan akuntabilitas di Desa Nisombalia, sedangkan pada penelitian peneliti tidak terdapat kendala dalam akuntabilitas di BUMDesma Mayang Sejahtera.

Berdasarkan deskripsi penelitian terdahulu, berikut adalah tabel tabulasi yang telah disusun oleh peneliti:

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Lasiati, 2021.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan BUMDesma. 2. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. 3. Teori Akutabilits yang digunakan. 	Hasil penelitian pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam penerapan prinsip akuntabilitas laporan keuangannya, sedangkan pada penelitian peneliti tidak terdapat kendala dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangannya.

²⁶ Nurul Afni, dkk, "Penerapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan," *YUME: Journal of Management* 7, no. 1 (2024): 402-406.

No	Nama Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
2.	Linda Lomi Ga, 2021.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang penerapan prinsip Akuntabilitas dalam laporan keuangan. 2. Teori akuntabilitas yang digunakan. 3. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. 	<p>Hasil pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa BUMDes Ina Huk belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangannya, sedangkan pada penelitian peneliti menunjukkan bahwa BUMDesma Mayang Sejahtera sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangannya.</p>
3.	Sahila Izza Afkarina, 2023.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang akuntabilitas 2. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 	<p>Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu kualitatif menggunakan paradigma interpretif, sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan kualitatif dengan <i>field research</i>.</p>
4.	Fani Hidayatulloh, 2023.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori akuntabilitas yang digunakan. 2. Metode dan teknik yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang penerapan akuntabilitas dalam tahapan pengelolaan dana Desa Kemiri, sedangkan pada penelitian peneliti membahas tentang penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan BUMDesma Mayang Sejahtera.</p>

No	Nama Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
5.	Rukyatul Aini, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang akuntabilitas 2. Meneliti tentang akuntabilitas 3. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. 	Akuntabilitas dalam penyampaian di penelitian terdahulu yaitu melalui lisan kepada jama'ah pada setiap bulannya di Masjid Baytul Amal, sedangkan akuntabilitas dalam penelitian peneliti penyampaiannya yaitu melalui MAD LPJ di kantor Kecamatan Mayang.
6.	Novi Anggraeni, 2023.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang akuntabilitas 2. Metode dan teknik yang digunakan yaitu kualitatif dan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 	Jenis penelitian pada penelitian terdahulu yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus sedangkan pada penelitian peneliti yaitu kualitatif dengan pendekatan <i>field research</i> .
7.	Angelina Nadia Saputra, Firdha Ayu Anggraeni, Mitha Dwi Restuti, 2023.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang akuntabilitas 2. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. 	Jenis penelitian pada penelitian terdahulu yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus sedangkan pada penelitian peneliti yaitu kualitatif dengan pendekatan <i>field research</i> .
8.	Shinta Maulydia Sari, 2023.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang akuntabilitas. 2. Metode dan teknik yang digunakan yaitu kualitatif dan teknik observasi, 	Hasil pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa BUMDes “Karya Mulya” masih kurang akuntabel dan transparan. Sedangkan pada penelitian peneliti

No	Nama Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
		wawancara, dan dokumentasi.	menunjukkan bahwa BUMDesma Mayang Sejahtera sudah akuntabel dan transparan
9.	Neneng Musyrifatul Amelia dan Muhammad Taufiq Hidayat, 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang akuntabilitas 2. Metode dan teknik yang digunakan yaitu kualitatif dan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 	Peraturan yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan PERMENDAGRI Nomor 11 Tahun 2021.
10.	Nurul Afni, Muhammad Su'un, dan Abbas Selong, 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang akuntabilitas 2. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. 	Hasil penelitian pada penelitian terdahulu terdapat kendala dalam penerapan akuntabilitas di Desa Nisombalia, sedangkan pada penelitian peneliti tidak terdapat kendala dalam akuntabilitas di BUMDesma Mayang Sejahtera.

Sumber: Data kajian terdahulu yang diolah

Berlandaskan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa, ditemukan bahwa terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu pembahasan tentang bagaimana penerapan akuntabilitas di instansi-instansi publik seperti BUMDesma, BUMDes, dan Desa. Perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian peneliti yaitu terletak pada pembahasan, hasil penelitian, jenis penelitian yang digunakan, dan peraturan yang digunakan. Pada penelitian terdahulu masih banyak instansi pemerintahan yang masih kurang menerapkan

prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, dan masih banyak terdapat kendala dalam penerapan prinsip akuntabilitas. Akan tetapi pada penelitian peneliti BUMDesma MayangSejahtera yang menjadi objek penelitian peneliti sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangannya. Dan penyampaian yang dilakukan oleh BUMDesma Mayang Sejahtera yaitu dengan mengadakan MAD LPJ sebagai bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak BUMDesma selaku pengelola keuangan pemerintah kepada pihak yang memiliki kewenangan.

B. Kajian Teori

Bagian ini membahas teori yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian. Dengan merinci teori secara menyeluruh, peneliti dapat memperluas pemahaman dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁷ Kajian teori ini mencakup:

1. Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajemen organisasi (*agency*). Di dalam organisasi sektor publik, pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Hubungan kontrak yang terbentuk di antara keduanya berfokus pada peran pemerintah sebagai pengemban tugas untuk memberikan pelayanan publik. Namun, dalam prakteknya pemerintah terkadang bertindak di luar dari fungsinya dengan membatasi akses informasi masyarakat.

²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 92.

Pembatasan tersebut menimbulkan konflik yang disebabkan ketidakseimbangan kepemilikan informasi antara agen dan *principal*. Dengan adanya batasan tersebut ketidakpercayaan masyarakat terhadap transparansi pemerintah terhadap hasil evaluasi kinerjanya akan menurun.

Konsep Agency Theory adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* adalah pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi dari teori agensi adalah hubungan antara *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* (manajer). Dan di dalam hubungan keagenan tersebut terdapat suatu kontrak dimana pihak *principal* memberi wewenang kepada *agent* untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*.

Agency theory (teori keagenan) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (owner) sebagai prinsipal membangun sebuah kontrak kerjasama yang disebut dengan "*nexus of contract*", kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (owner). Implikasinya memungkinkan terjadinya sikap oportunistik (*opportunistic*

behaviour) dikalangan manajemen perusahaan dalam melakukan beberapa tindakan yang sifatnya disengaja seperti:

- a. Melaporkan piutang tak tertagih (*bad debt*) yang lebih besar dari kenyataan yang sesungguhnya.
- b. Melaporkan hasil penjualan dengan peningkatan yang tidak terlalu tinggi.
- c. Melaporkan kepada pihak *principal* bahwa dibutuhkan dana tambahan untuk menunjang pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakan jika tidak dibantu maka proyek akan terhenti.
- d. Melakukan *income smooting*, berupa melaporkan pendapatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, namun sesuai dengan maksud dan keinginan agen (manajemen).

Pada umumnya, manajer dan pemegang saham sering memiliki tujuan yang berbeda, yang menyebabkan konflik kepentingan atau konflik agensi. Pengambilan keputusan oleh manajer sering kali lebih berpihak kepada kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan pemegang saham. Konflik ini umum terjadi di perusahaan besar karena kepemilikan saham oleh manajer biasanya kecil, sehingga manajer cenderung membuat keputusan yang tidak menguntungkan pemegang saham.

Di dalam hubungan keagenan, manajer merupakan pihak yang memiliki informasi penuh yang ada di dalam perusahaan, dimulai dari lingkungan kerja, kapasitas diri, dan prospek perusahaan dimasa yang

akan datang. Tetapi terkadang ada saja informasi mengenai perusahaan yang tidak diungkapkan oleh manajer kepada investor. Untuk mengurangi hal tersebut dibutuhkan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan apa yang dilakukan oleh manajer telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam perusahaan.²⁸

Berdasarkan beberapa teori agensi yang sudah dipaparkan, peneliti mengambil teori agensi yang dikemukakan oleh scott karena *principal* adalah pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*. Teori agensi yang dikemukakan oleh scott adalah salah satu teori yang dapat memberikan landasan yang kuat untuk memahami hubungan antara *principal* (pemerintah) dan *agent* (BUMDesma Mayang Sejahtera). Jadi pemerintah (*principal*) mempekerjakan BUMDesma Mayang Sejahtera (*agent*) agar melakukan tugas untuk kepentingan pemerintah (*principal*), yakni untuk membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Mayang. Oleh karena itu, teori ini dijadikan landasan dalam penelitian ini.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung

²⁸ Mikael Edowai, Miah Said, dkk, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Sulawesi Selatan: CV. Berkah Utami, 2021), 7-11.

jawab nya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.²⁹

Prinsip akuntabilitas dalam Al-Quran telah dijelaskan sebagai suatu keharusan untuk bersikap amanah dan adil. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa [4]:58).³⁰

Akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan kewajiban individu atau kelompok terhadap unit organisasi untuk setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³¹

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip akuntabilitas dalam proses pelaksanaan pelayanan publik maka dapat dilihat dari beberapa indikator akuntabilitas yang dikemukakan oleh Solihin, indikator minimum akuntabilitas yaitu : 1) Adanya kesesuaian antara

²⁹ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Revisi* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2021), 18.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Fattah dan Terjemahannya*, 45.

³¹ Edowai, Abubakar, dan Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 17.

pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, 2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, 3) Adanya *output* dan *outcome* yang terukur. Untuk mendukung indikator minimal akuntabilitas tersebut ada perangkat pendukung indikator minimum akuntabilitas yaitu : a) Adanya Standart Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan kebijakan, b) Mekanisme pertanggungjawaban, c) Laporan tahunan.³²

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek. Menurut Hopwood dan Tomkins dan Elwood dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain:

- a. Akuntabilitas hukum dan dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi.

Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law*

³² Widya Nengsih, Fachri Adnan, dan Fitri Eriyanti, "Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 2, no. 1 (2019): 4.

enforcement), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi serta tidak melakukan kebohongan publik.

b. Akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*)

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customer-nya.

c. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Lembaga-lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan bermanfaat untuk rakyat bukan sekadar program untuk menghabiskan anggaran yang tidak jelas tujuannya.

d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak negatif yang

diakibatkan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan memperoleh manfaat dan kerugian atas kebijakan tersebut. Langkah apa yang dipersiapkan untuk mengantisipasi dampak negatif jika timbul.

e. Akuntabilitas finansial (*financial accountability*)

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik menjadi perhatian utama masyarakat.³³

Indikator dari akuntabilitas finansial adalah:

- 1) Integritas Keuangan, yakni laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.
- 2) Pengungkapan, yakni mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi.

³³ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Revisi*, 19-20.

- 3) Ketaatan, yakni taat terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum dari akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu transaksi dalam suatu pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditunjukkan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.³⁴

Berdasarkan beberapa teori akuntabilitas di atas, peneliti ingin mengambil teori akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab nya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.. Teori ini adalah salah satu teori yang dapat memberikan landasan yang kuat untuk memahami tentang peran akuntabilitas dalam mempertanggung jawabkan segala aktivitas dan pelaporan keuangan kepada pihak yang memiliki hak untuk mengetahui informasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, teori ini dijadikan landasan dalam penelitian ini.

³⁴ Edowai, Abubakar, dan Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 28.

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.³⁵

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk mendapatkan informasi posisi keuangan perusahaan. Dalam laporan keuangan juga terdapat informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan. Dilakukannya analisis dengan membandingkan data keuangan di dua periode atau lebih dapat menghasilkan data yang lebih rinci. Sehingga rincian data tersebut dapat digunakan untuk mendukung suatu keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan.³⁶

Laporan Keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Kieso et al., laporan keuangan menjadi sarana utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak diluar perusahaan dan menggambarkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam satuan uang.³⁷

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari

³⁵ Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, 22.

³⁶ Sufyati, dkk, *Analisis Laporan Keuangan* (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), 8.

³⁷ Hedy Desiree Rumambi dkk, *Penyusunan Laporan Keuangan UMKM* (Sulawesi Utara: Polimbo Press, 2019), 39.

sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah:

- a. *Screening* (sarana informasi), analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya, dengan demikian seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa.
- b. *Understanding* (pemahaman), analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.
- c. *Forecasting* (peramalan), analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang.
- d. *Diagnosis* (diagnose), analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan.
- e. *Evaluation* (evaluasi), analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien.³⁸

Laporan keuangan memiliki jenis-jenis laporan, adapun jenis-jenis di dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Neraca menunjukkan posisi keuangan yaitu aktiva, hutang, dan ekuitas, suatu perusahaan pada tanggal tertentu, seperti pada akhir triwulan atau akhir tahun.

³⁸ Wastam Wahyu Hidayat, *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 4-5.

- b. Laporan Laba Rugi menyajikan hasil usaha yaitu pendapatan, beban, laba atau rugi bersih dan laba atau rugi per saham untuk periode akuntansi tertentu.
- c. Laporan Ekuitas merekonsiliasi saldo awal dan akhir semua akun yang ada dalam seleksi ekuitas pada neraca. Beberapa perusahaan menyajikan laporan saldo laba, sering kali dikombinasikan dengan laporan rugi laba yang merekonsiliasi saldo awal dan akhir akun saldo laba. Perusahaan-perusahaan yang memilih format penyajian yang terakhir biasanya akan menyajikan laporan ekuitas sebagai pengungkapan dalam catatan kaki.
- d. Laporan Arus Kas memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama suatu periode akuntansi.³⁹

Berdasarkan beberapa teori laporan keuangan di atas, peneliti ingin mengambil teori laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Teori ini adalah salah satu teori yang dapat memberikan landasan yang kuat untuk memahami tentang laporan keuangan dalam memberikan informasi tentang kondisi keuangan pada sebuah lembaga atau perusahaan. Oleh karena itu, teori ini dijadikan landasan dalam penelitian ini.

³⁹ Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pada penelitian kualitatif instrumen penelitian orang atau *human instrument* adalah peneliti itu sendiri.⁴⁰ Peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah *field research* yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Peneliti melakukan observasi secara langsung dilapangan masyarakat, organisasi maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan.⁴¹ Peneliti dalam penelitian ini langsung terjun ke lapangan yang dilakukan langsung di Kantor BUMDesma Mayang Sejahtera dengan melalui cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 4.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 4.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berarti dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁴² Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Tegal Rejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Alasan peneliti melakukan penelitian di BUMDesma Mayang Sejahtera guna mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pada laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera karena mayoritas masyarakat di Kecamatan Mayang masih belum memahami realisasi dari penggunaan dana desa yang dijalankan oleh pihak BUMDesma Mayang Sejahtera.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BUMDesma Mayang Sejahtera yang beralamat di Dusun Krajan, RT: 001 RW: 002, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68182.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang.⁴³ Bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi apa saja yang diperoleh, siapa yang dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data dicari dan disaring sehingga validitasnya dapat dijamin.

Pemilihan subyek penelitian ini menggunakan *purposive*, karena pemilihan sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Misalnya orang yang akan terlibat langsung dengan kondisi yang diteliti dan orang

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

⁴³ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 132.

tersebut bersifat netral dalam artian tidak memiliki kepentingan untuk menjelek-jelekkan lembaga atau organisasi tersebut. Dengan begitu peneliti dapat memperoleh informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, sehingga menghasilkan data yang valid.⁴⁴

Pemilihan narasumber penelitian didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Direktur BUMDesma Mayang Sejahtera
2. Orang-orang yang mengetahui dan terlibat dengan permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik

Berdasarkan kriteria narasumber diatas dapat ditentukan sumber yang akan dijadikan acuan dalam mendapatkan data dari sampel yang sudah ditentukan, diantaranya:

- a. Direktur : Bapak Denie Ardi
- b. Manajer : Bapak Abdullah
- c. Sekretaris : Ibu Faikotul Alfiyah
- d. Bendahara : Ibu Ilil Nurfadilah
- e. Nasabah : Ibu Elmi

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan-pendekatan ini dimanfaatkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan memadai terhadap fenomena yang sedang diselidiki.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D*, 85.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam obyek penelitian.⁴⁵ Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu observasi partisipan dengan secara langsung terlibat dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas laporan keuangan BUMDesma Mayang Sejahtera.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data oleh peneliti dengan melalui percakapan atau tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara untuk mencari informasi. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang mana pelaksanaannya tidak bebas. Peneliti juga melakukan wawancara secara mendalam, dalam hal ini peneliti mengumpulkan informasi atau data melalui tatap muka langsung, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁴⁶

Wawancara dilakukan guna memperoleh data atau informasi mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera. Narasumber yang ditentukan oleh peneliti adalah Bapak Denie selaku Direktur BUMDesma Mayang Sejahtera dan juga jajaran pegawai di bawahnya.

⁴⁵ Moh Ahsanulhaq, "Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan," *Jurnal Prakarsa Paedagogia* 2, no.1 (2019), 27.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D*, 233.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada.⁴⁷ Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda, serta foto-foto kegiatan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara.

Penelitian ini memperoleh dokumentasi dari pihak kantor BUMDesma Mayang Sejahtera berupa foto, gambar, struktur atau segala bentuk dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan prinsip akuntabilitas pada laporan keuangan BUMDesma Mayang Sejahtera.

E. Analisis Data

Pada bagian ini merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan, sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan selesai di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Analisis data yang digunakan

⁴⁷ Vina Febiani Musyadad dkk, "Supervisi Akademik untuk Meningkatkan Motivasi Kerja Guru dalam Membuat Perangkat Pembelajaran," *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no.6 (2022): 1939.

dalam penelitian yaitu menggunakan analisis data yang dilakukan secara interaktif model Miles dan Huberman. Mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu: Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.”

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu telah dikumpulkan dalam aneka macam (wawancara, dokumentasi), dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan pengetikan, penyuntingan atau ahli tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.⁴⁸

2. Kondensasi Data

Miles, Huberman dan Sidana mengemukakan “*data condensation refers to the process of selcting data, focussin, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcription*”. Dalam kondensasi data merujuk kepada proses seleksi, memfokuskan, mnyederhanakan, mengabstrakkan dan juga

⁴⁸ Muhammad Basri dkk, "Nilai-Nilai Sejarah Berbasis Local Wisdom Situs Batu Berak Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah," *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* 5, no.2 (2020):127.

mentransformasikan data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip.

3. Penyajian Data

Setelah data dirangkum langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan untuk menyajikan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penyajian data dalam peneliti meliputi, menyajikan hasil wawancara yang telah direkam dan telah disalin dalam bentuk tulisan. Dari hasil penyajian data, baik wawancara, maupun dokumen dilakukan analisis. Selanjutnya, disimpulkan bahwa ada data temuan dari ketiga data tersebut, sehingga mampu menjawab permasalahan dalam penelitian.

4. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan setelah kondensasi dan penyajian data adalah mengambil kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian yaitu dapat menjawab dari fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal.⁴⁹

F. Keabsahan Data

Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data. Metode triangulasi merupakan salah satu metode menguji keabsahan. Triangulasi adalah

⁴⁹ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 15.

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.

Adapun peelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁵⁰ Dan data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan atau disebut dengan mengecek dengan sumber data tersebut.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan yaitu meliputi tahap pra-lapangan, tahap penelitian lapangan, dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra-lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Memilih dan menentukan informan
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - f. Memahami etika penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Mengunjungi lokasi penelitian
 - c. Mengumpulkan data

⁵⁰ Dewi Angraini, "Analisis Pengawasan Sistem Pengajaran di Edu Smart Learning Center Medan," *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen* 7, no.1 (2019): 26.

d. Menyempurnakan data yang belum lengkap

3. Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahapan terakhir dari proses penelitian yang bertujuan untuk menganalisis data agar tetap terarah dan tidak melebar kemana-mana, sesuai dengan fokus penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BUMDesma Mayang Sejahtera

BUMDesma merupakan transformasi dari program pemerintah sebelumnya yaitu PNPM MP. Keberadaannya sejak tahun 2007 sudah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya dibidang perekonomian mikro. Meskipun banyak lembaga keuangan yang menawarkan program serupa yaitu pinjaman tanpa jaminan, tetapi keberadaan BUMDesma tetap memiliki tempat dan mampu bersaing. Hal ini dapat dibuktikan dengan bertambahnya kelompok-kelompok yang bergabung sebagai mitra BUMDesma. Data LPP menunjukkan sebanyak 19 kelompok baru bergabung menjadi mitra BUMDesma di tahun 2023. Tetapi tidak semua pengajuan kelompok baru dapat disetujui, beberapa pengajuan kelompok baru dikembalikan karena hasil survey lingkungan yang tidak layak.

Selain bertambahnya kelompok-kelompok baru, hal lain yang menjadi pencapaian BUMDesma adalah menurunnya kolektibilitas 5 ditahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2022 Kolektibilitas 5 tercatat sebesar 2.200.622.000,- sedangkan ditahun 2023 tercatat sebesar 2.190.381.000,- menurun sebanyak 10.241.000. meskipun turun tidak signifikan, tetapi ini wajib diapresiasi. Artinya tim

operasional BUMDesma melakukan upaya untuk menekan pinjaman bermasalah.

Adapun surplus yang diperoleh pada tahun 2023 sebesar 597.156.569. realisasi ini telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 484.721.500. Pada tahun 2023, selain pelayanan dibidang keuangan mikro, BUMDesma membuka unit usaha baru berupa penyedia jasa alat tulis atau ATK dan penyedia bahan pangan terjangkau bagi masyarakat berupa beras. Kedua unit usaha ini dibuka pada pertengahan dan diakhir tahun 2023. Unit Usaha yang bergerak dibidang penyedia pangan memberikan respon yang positif. Sebanyak lima ton beras dapat terjual hanya dalam waktu enam hari saja. Permintaan konsumen yang terus bertanya dan datang kekantor BUMDesma menjadi semangat bagi tim operasional agar kedepannya dapat memenuhi permintaan pasar tanpa kehabisan stok. Sedangkan untuk unit Usaha ATK, berkembang tidak sesuai harapan. Dalam kurun waktu delapan bulan, tingkat transaksi dapat dikatakan tidak kontinue setiap hari. PR besar tentunya, bagi tim operasional untuk meningkatkan penjualan atau melakukan evaluasi terhadap perkembangan unit usaha ATK.⁵¹

⁵¹ Faikotul Alfiah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Januari 2024.

2. Profil BUMDesma Mayang Sejahtera

- a. Nama BUM Desa : BUM DESA BERSAMA MAYANG
SEJAHTERA LKD
- b. No Registrasi : 3509262005-2-058987
- c. Alamat : Dusun Krajan, RT/RW: 001/002, Desa Tegal
Rejo, Kec Mayang, Kab. Jember, Jawa
Timur.
- d. Email : mayangsejahtera5@gmail.com
- e. Nama Kepala Desa : Nunung Adi Kontesa
- f. Tahun Perdes : 31-12-2021
- g. Nomor Perdes : 02 Tahun 2022
- h. Tahun Berdiri : 30 Desember 2021⁵²

3. Visi dan Misi BUMDesma Mayang Sejahtera

a. Visi

Bersama membangun perubahan bagi masyarakat dalam meraih kesejahteraan dalam perspektif pemberdayaan.

b. Misi

- 1) Mengembangkan usaha ekonomi melalui usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit usaha yang bergerak pada sector riil ataupun jasa public.
- 2) Mewujudkan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Kecamatan Mayang.

⁵² Faikotul Alfiyah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Januari 2024.

- 3) Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
- 4) Melestarikan adat istiadat, budaya dan kearifan lokal.
- 5) Menumbuh kembangkan potensi lokal untuk dikelola menjadi produk yang mempunyai nilai jual secara ekonomi.
- 6) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan pekerjaan.⁵³

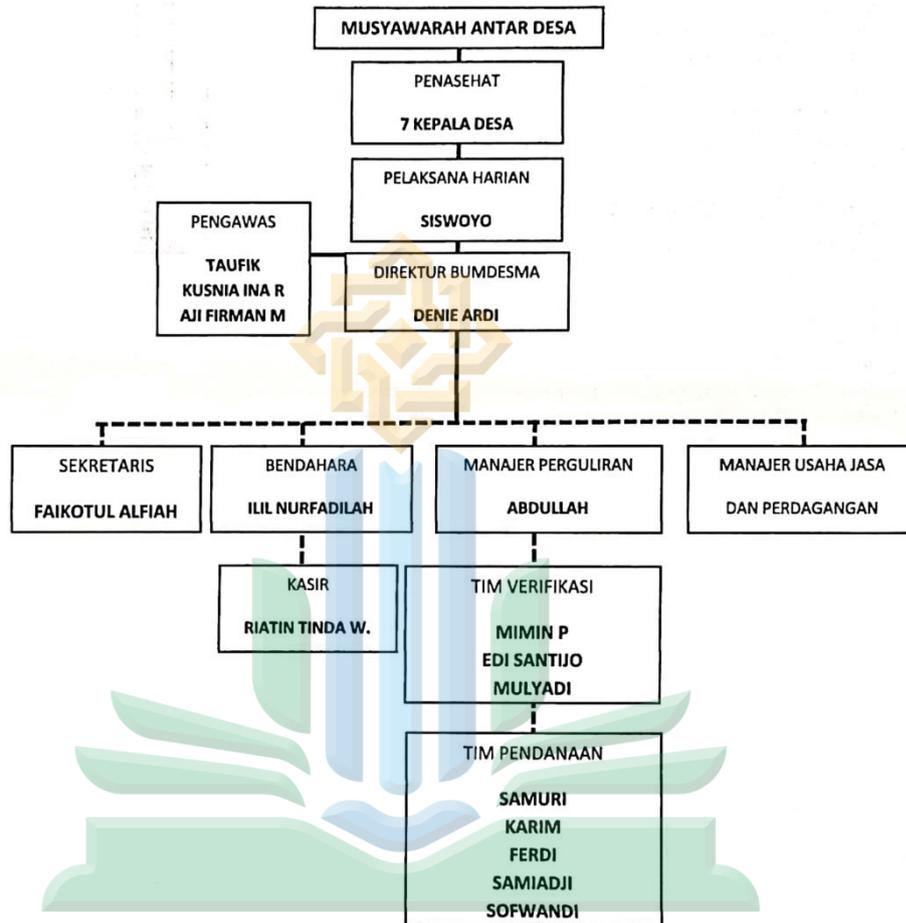
4. Struktur Organisasi BUMDesma Mayang Sejahtera

Susunan organisasi dalam BUMDesma Mayang Sejahtera terdiri dari: Musyawarah Antar Desa (MAD), Penasehat yang dijabat secara rangkap oleh tujuh kepala desa dan satu orang yang ditunjuk melaksanakan fungsi kepenasehatan, Pelaksana Operasional (direktur), dan Pengawas. Struktur Organisasi dapat dilihat pada bagian di bawah ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵³ Faikotul Alfiah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Januari 2024.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BUMDesma Mayang Sejahtera



Sejahtera Kecamatan Mayang, maka Tugas Pokok dan Fungsi UPK secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana BUMDesma Mayang Sejahtera di Kecamatan.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan BUMDesma Mayang Sejahtera.
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen BUMDesma Mayang Sejahtera.

- d. Bertanggung jawab terhadap dana bergulir dari BLM yang dialokasikan untuk kegiatan SPP maupun sumber dana lain dari program pemerintah dan swasta.
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.

Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi UPK secara khusus adalah sebagai berikut:

a. Ketua UPK

- 1) Melakukan pengendalian terhadap personil UPK.
- 2) Memimpin rapat UPK.
- 3) Mewakili UPK dalam rapat pertemuan dengan pihak-pihak terkait.
- 4) Menyetujui atau menolak pengajuan dana dari sekretaris dan bendahara.
- 5) Bersama Sekretaris dan Bendahara membuat rencana kerja dan menyusun perencanaan keuangan terhadap biaya operasional UPK.
- 6) Menandatangani surat-surat keluar, laporan, specimen rekening Bank, pencairan dana ke desa dan atau kelompok, kuitansi pembayaran, setoran pinjaman, surat perjanjian dan lain sebagainya yang diamanatkan oleh MAD.
- 7) Melakukan validasi dan verifikasi seluruh dokumen keuangan dan kegiatan dana bergulir.
- 8) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan di tingkat desa dan kecamatan.

- 9) Menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan kepada BKAD.
- 10) Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam dan penagihan kepada kelompok.

b. Sekretaris UPK

- 1) Bertanggungjawab atas pengarsipan dokumen dan data informasi lainnya.
- 2) Mengisi dan mencatat agenda kegiatan harian dan daftar hadir pengurus.
- 3) Menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan UPK, Laporan perkembangan pinjaman, hasil keputusan MAD ke desa dan atau masyarakat melalui papan informasi atau media informasi lainnya.
- 4) Mengelola barang-barang inventaris dan sarana kerja lainnya.
- 5) Membuat surat-surat.
- 6) Mencatat proses dan keputusan rapat.
- 7) Memegang buku daftar hadir pengurus.
- 8) Menerima proposal kelompok.
- 9) Evaluasi singkat usulan pinjaman dari kelompok, meliputi: latar belakang kelompok, kondisi kelompok, riwayat pinjaman kelompok, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman.
- 10) Melakukan rekapitulasi usulan pengajuan pinjaman per anggota kelompok.

- 11) Melaporkan rekapitulasi pengajuan kelompok pada ketua UPK.
- 12) Menyiapkan format kegiatan verifikasi kelompok.
- 13) Menyiapkan dokumen persiapan pelaksanaan musyawarah pendanaan perguliran.
- 14) Menyiapkan dokumen pencairan ke kelompok (SPK, BA pencairan, kartu angsuran kelompok, buku administrasi kelompok).
- 15) Melakukan pembinaan administrasi kelompok.
- 16) Mengisi kartu angsuran kelompok di UPK.
- 17) Membuat laporan LPP (form 80), collectibilitas (form 81), laporan perkembangan kelompok (form 84 a,b,c), laporan realisasi perguliran dan proposal kelompok (form 2b).
- 18) Melakukan pengarsipan dokumen pengelolaan dana bergulir.
- 19) Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam dan penagihan ke kelompok.

c. Bendahara UPK

- 1) Mencatat dan membukukan setiap transaksi keuangan, menyimpan bukti transaksi dan memegang uang kas.
- 2) Memegang semua buku rekening Bank dana UPK.
- 3) Membuat laporan keuangan kegiatan perguliran.
- 4) Melakukan pembayaran uang atas persetujuan ketua.
- 5) Menyetor uang ke Bank.

- 6) Melakukan tugas lain yang relevan dalam pengelolaan kegiatan dana bergulir.
- 7) Melakukan pengarsipan dokumen pengelolaan keuangan.
- 8) Melakukan pembinaan terhadap kelompok pinjaman dan penagihan ke kelompok.

d. Kasir

- 1) Menerima saldo kas pada pembukuan kas harian dari bendahara UPK.
- 2) Menerima angsuran kelompok dan mencatatnya dalam buku kas harian.
- 3) Membantu bendahara dalam pengarsipan slip angsuran kelompok.
- 4) Membantu bendahara dalam penyetoran uang ke Bank.
- 5) Menyerahkan saldo kas harian pada bendahara setelah tutup jam kas.
- 6) Membuat BA *cash opname* setelah jam tutup kas.
- 7) Melakukan pengarsipan kas harian dan BA *cash opname*.
- 8) Melakukan tugas lain yang relevan dalam pengelolaan kegiatan dana bergulir.⁵⁴

⁵⁴ Faikotul Alfiah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Januari 2024.

5. Unit Usaha BUMDesma Mayang Sejahtera

BUM Desa bersama Mayang Sejahtera memiliki tiga unit usaha, diantaranya:

a. Unit Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Unit Simpan Pinjam Perempuan merupakan kegiatan pemberian permodalan yang diperuntukkan khusus untuk perempuan. Adapun yang menjadi tujuan umum pendirian unit usaha ini adalah kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan, mendorong pengurangan rumah tangga miskin, serta untuk penciptaan lapangan kerja.

BUM Desa Bersama Mayang Sejahtera memberikan pinjaman dengan plafond satu sampai lima juta saja. Tenor atau jangka waktu yang diberikan hanya 10 bulan, dan anggota harus menyetorkan angsurannya selama satu bulan sekali. Margin yang dikenakan adalah per satu jutanya itu dua ratus ribu. Dalam ketentuannya, setiap desa harus membentuk kelompok dengan beberapa anggota. Proses pengajuan pinjaman di BUM Desa Bersama Mayang terbilang cukup mudah, hanya bermodalkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), persetujuan suami, dan hasil survei yang baik atau sudah sesuai dengan ketentuan (pendapatan, keadaan usaha, pengeluaran, dan tanggungan yang dimiliki) maka pinjaman bisa langsung disetujui. Bagi anggota baru yang akan mengajukan pinjaman, hanya

diberikan plafond sebesar 1 juta saja. Namun seiring berjalannya waktu, plafondnya akan naik setiap 1 juta.

Dengan adanya unit usaha ini dapat membantu perekonomian masyarakat, serta diharapkan juga dapat mengurangi angka kemiskinan.⁵⁵

b. Unit Usaha ATK

Sebelum ditransformasikan menjadi BUMDesma, pelayanan yang diberikan hanya berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) saja. Dari hal tersebut, BUM Desa Bersama Mayang Sejahtera melakukan pengembangan sistem pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk satu unit usaha lagi, yaitu unit usaha ATK.

Unit usaha ATK merupakan unit usaha yang bergerak pada layanan jasa penyedia alat tulis. Usaha ATK ini resmi beroperasi pada bulan Mei 2023. Produk yang dijual meliputi pulpen, pensil, buku, penggaris, penghapus, rautan, lakban, lem, spidol, refil tinta spidol, cutter, amplop, dan lain sebagainya.⁵⁶

c. Unit Usaha BAPOKTING

Unit Usaha BAPOKTING merupakan salah satu unit usaha yang dimiliki BUM Desa Bersama Mayang Sejahtera yang bergerak pada bidang penyedia bahan pokok. Unit usaha ini baru dibuka pada pertengahan Desember, tepatnya pada tanggal 18 Desember 2023.

⁵⁵ Faikotul Alfiah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Januari 2024.

⁵⁶ Faikotul Alfiah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Januari 2024.

Meskipun unit usaha ini baru dibuka pada akhir tahun, namun respon dari masyarakat sangat positif atau mengembirakan. Hal tersebut bisa dilihat dari beras SPHP yang menjadi produk pertama yang dipasarkan sudah terjual sebanyak 5 ton hanya dalam waktu 6 hari saja. Dengan respon pasar yang positif, dapat menjadi motivasi bagi staff pelaksana operasional BUM Desa Bersama Mayang Sejahtera untuk menyediakan bahan-bahan pokok lainnya yang terjangkau bagi masyarakat.⁵⁷

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan tahap dalam penelitian di mana informasi yang terkumpul disusun dan disajikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian serta analisis data yang relevan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai sarana untuk mendukung penelitian. Data hasil penelitian akan dipresentasikan secara berurutan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik dalam menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien, efektif, tidak ada pemborosan, serta korupsi.⁵⁸

⁵⁷ Faikotul Alfiyah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Januari 2024.

⁵⁸ Edowai, Abubakar, dan Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 28.

Akuntabilitas keuangan sangat penting, karena melakukan pengelolaan uang publik, dan hal itu akan menjadi perhatian publik.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera sangat penting, karena modal yang digunakan dalam kegiatan BUMDesma Mayang Sejahtera adalah modal yang berasal dari pemerintah melalui program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Pihak BUMDesma Mayang Sejahtera harus memaparkan hasil laporan keuangannya kepada pihak yang memiliki kewenangan, seperti kepala desa di Kecamatan Mayang, dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), dan masyarakat Kecamatan Mayang. Pemaparan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus sebagai bukti bahwa pihak pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera sudah amanah dalam menjalankan tugas yang diberikannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa: 58).⁵⁹

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang untuk menyampaikan amanah kepada orang yang

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Fattah dan Terjemahannya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), 45.

berhak menerimanya, serta menegakkan hukum secara adil. Hubungan akuntabilitas dengan surah An-Nisa ayat 58 adalah terdapat konsep dasar yang sama, yaitu seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanahnya kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya.

Akuntabilitas berarti kewajiban pemegang amanah untuk melaporkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada orang atau pihak yang memiliki kewenangan.⁶⁰ Penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera akan terwujud ketika pihak BUMDesma Mayang Sejahtera memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan keuangan kepada seluruh kepala desa di Kecamatan Mayang, dinas PMD, dan Masyarakat Kecamatan Mayang. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman akuntabilitas juga sangat penting, karena orang yang diberikan amanah dapat mengetahui apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, serta bagaimana cara menjalankan amanah yang diberikannya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Abduh selaku Manajer BUMDesma Mayang Sejahtera yang mengatakan tentang pemahaman akuntabilitas sebagai berikut: “Akuntabilitas itu sama halnya dengan tanggung jawab mbak. Jadi kita itu memiliki tanggung jawab tentang

⁶⁰ Edowai, Abubakar, dan Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 28.

semua kegiatan BUMDesma Mayang ini mbak, termasuk juga dalam pengelolaan keuangannya mbak.”⁶¹

Dari Bapak Abduh dapat diketahui bahwa akuntabilitas adalah tanggung jawab. Jadi pihak pengelola BUMDesma Mayang ini bertanggung jawab atas semua kegiatan BUMDesma Mayang, termasuk pengelolaan keuangan BUMDesma Mayang Sejahtera.

Ibu Faik selaku Sekretaris BUMDesma Mayang Sejahtera menuturkan: “Akuntabilitas berarti kita wajib melaporkan kegiatan BUMDesma Mayang Sejahtera kepada pemangku kepentingan. Dalam melaporkan, kita biasanya membuat laporan keuangan dan LPJ” .⁶²

Pernyataan dari Ibu Faik dapat diketahui bahwa arti akuntabilitas menurut Ibu Faik adalah wajib melaporkan kegiatan BUMDesma Mayang Sejahtera kepada pemangku kepentingan. Dalam melaporkan, BUMDesma memberikan laporan keuangan dan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) kepada pemangku kepentingan.

Selaras dengan pernyataan Ibu Faik, Ibu Ilil selaku Bendahara BUMDesma Mayang Sejahtera menjelaskan bahwa:

Akuntabilitasnya kita adalah untuk memberikan laporan yang sudah kita buat, yaitu laporan keuangan dan LPJ. Laporan keuangan kita buat setiap bulannya, dan laporan keuangan tersebut kita berikan kepada dinas PMD dan seluruh kepala desa di Kecamatan Mayang. Untuk LPJ nya kita berikan ketika di adakan MAD.⁶³

⁶¹ Abdullah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 8 Januari 2024.

⁶² Faikotul Alfiyah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Januari 2024.

⁶³ Ilil Nurfadilah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2024.

Penjelasan dari Ibu Ilil dapat diketahui bahwa bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawabannya adalah dengan cara memberikan laporan yang sudah dibuatnya kepada pihak yang memiliki kewenangan. Laporan tersebut berupa laporan keuangan dan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban).

Pernyataan Ibu Ilil diperkuat oleh Bapak Danie selaku Direktur BUMDesma Mayang Sejahtera yang turut menjelaskan bahwa:

Kita memiliki tanggung jawab untuk membuat, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan kegiatan BUMDesma Mayang Sejahtera kepada para pemangku kepentingan, dan ini disebut akuntabilitas. Selain itu, kita harus menjalankan kegiatan BUMDesma Mayang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang sudah ditetapkan. Serta kita juga wajib memberikan laporan keuangan setiap bulannya kepada kepala desa dan dinas PMD, sedangkan untuk LPJ nya kita laporkan dalam MAD.⁶⁴

Penjelasan dari Bapak Danie dapat diketahui bahwa akuntabilitas berarti tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan BUMDesma Mayang Sejahtera kepada pemangku kepentingan, serta menjalankan kegiatan BUMDesma Mayang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dalam melaporkan, pihak BUMDesma Mayang memberikan laporan keuangan setiap bulan kepada kepala desa dan dinas PMD, sedangkan untuk LPJ nya dilaporkan saat MAD (Musyawarah Antar Desa).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera sudah baik dalam memahami akuntabilitas. Pihak pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera sudah mengetahui akuntabilitas atau tanggung jawab yang diberikannya, serta

⁶⁴ Danie Ardi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 Januari 2024.

sudah mengetahui juga bagaimana cara menjalankan tanggung jawab tersebut. Bentuk pertanggung jawaban BUMDesma Mayang Sejahtera kepada para pemangku kepentingan adalah dengan membuat laporan keuangan setiap bulan, dan membuat LPJ setiap akhir periode.⁶⁵

Pihak pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera memiliki peran penting dalam penggunaan keuangan dan proses pelaksanaan kegiatan BUMDesma Mayang Sejahtera. Hal ini dikarenakan menyangkut dengan dana yang diberikan oleh pemerintah, serta dana tersebut digunakan untuk membantu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Mayang. Sehingga bentuk pertanggung jawaban pihak pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera dalam mengelola uang pemerintah adalah dengan cara membuat laporan keuangan. Serta laporan keuangan diberikan kepada pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.⁶⁶ Laporan keuangan sangat penting dan harus disusun oleh setiap lembaga keuangan maupun Lembaga non-keuangan, termasuk BUMDesma Mayang Sejahtera. Akuntabilitas finansial akan terpenuhi apabila laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan indikator atau

⁶⁵ Munir Is'adi dan Nur Ika Mauliyah, "Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel Pada Lembaga Amil Zakat Azka Jember," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (Januari 2022): 94.

⁶⁶ Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, 22.

pengukuran dari akuntabilitas finansialnya sendiri. Indikator tersebut mencakup tentang integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan.

a. Integritas Keuangan

Integritas keuangan berarti prinsip dan praktik menjaga kejujuran dalam mengelola dan melaporkan keuangan. Hal ini berarti seorang pegawai harus jujur dan tidak memihak dalam pembuatan laporan keuangan. Pihak yang membuat laporan keuangan harus memiliki integritas yang tinggi terhadap fakta atau keadaan yang ada, lalu laporan keuangan dibuat dengan keadaan yang ada tersebut atau dengan apa adanya. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Hal ini sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Abduh selaku Manajer Bumdesma Mayang Sejahtera. Dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa:

Dalam bekerja kita diawasi oleh dua pengawas, yaitu pengawas internal dan pengawas eksternal. Untuk pengawas internalnya adalah badan pengawas dari BUMDesma Mayangnya sendiri. Tugas pengawas internal adalah untuk mengawasi dan mengaudit kinerja UPK setiap bulannya. Sedangkan untuk pengawas luarnya atau auditor eksternalnya adalah BPKP, yang tugasnya adalah untuk memantau dan memeriksa keuangan serta administrasi BUMDesma Mayang Sejahtera. Dengan adanya pengawas, maka laporan keuangan yang dibuat dan kinerja yang kita lakukan sudah pasti benar dan sesuai dengan aturan mbak.⁶⁷

Penjelasan dari Bapak Abduh dapat diketahui bahwa dalam bekerja pihak pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera diawasi oleh dua pengawas, yaitu pengawas internal dan pengawas eksternal.

⁶⁷ Abdullah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 8 Januari 2024.

Untuk pengawas internalnya adalah badan pengawas dari BUMDesma Mayang nya sendiri, sedangkan pengawas eksternalnya adalah BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Tugas dari pengawas adalah sama-sama untuk mengawasi dan memeriksa kinerja BUMDesma Mayang Sejahtera. Dengan adanya pengawas, maka laporan keuangan yang dibuat dan kinerja yang dilakukan oleh pihak pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera sudah pasti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Ibu Faik selaku Sekretaris BUMDesma Mayang Sejahtera juga menjelaskan bahwa:

Proses penyusunan atau pembuatan laporan keuangannya dilakukan secara manual dan *software*. Jadi bendahara yang melakukan pencatatan secara manual, sedangkan saya yang memasukkan nominal keuangannya di format laporan keuangan yang sudah tersedia. Format laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar dari dinas. Sehingga apabila ada ketidaksinkronan data, atau tidak *balance*, maka harus klarifikasi keduanya dan cari kesalahannya dimana.⁶⁸

Penjelasan dari Ibu Faik dapat diketahui bahwa dalam proses penyusunan atau pembuatan laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera dilakukan secara manual dan *software*. Jadi tugasnya bendahara adalah melakukan pencatatan keuangan secara manual, sedangkan tugasnya sekretaris adalah menginput atau memasukkan nominal keuangan di format laporan keuangan yang sudah disediakan. Format laporan keuangannya sudah mengikuti atau sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh dinas PMD.

⁶⁸ Faikotul Alfiyah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Januari 2024.

Sehingga apabila ada ketidaksinkronan data, maka harus ada klarifikasi dari bendahara dan sekretaris, serta di cari kesalahannya dimana.

Penjelasan dari Ibu Faik diperkuat dengan penjelasan Ibu Ilil selaku Bendahara BUMDesma Mayang Sejahtera yang mengatakan bahwa:

Saya selaku bendahara di sini, jadi saya harus memiliki sifat integritas keuangan mbak. Contohnya adalah ketika ada kelompok SPP yang menyetorkan uang angsurannya ke saya, maka saya akan mencatat uang masuk sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang di setorkan tersebut. Sehingga nanti akan sesuai, apa yang saya tulis di buku laporan dengan uang yang saya setorkan di bank. Jadi antara buku kas dan buku bank akan sama jumlah nominalnya. Selain itu, saya melakukan pencatatan transaksinya setiap hari, dan tidak ditumpuk. Saya juga dibantu oleh sekretaris untuk menginput nominal keuangan di format laporan keuangannya mbak, dan juga ada pengawas yang mengaudit atau memeriksa laporan keuangannya. Maka dari itu, dalam proses penyusunan dan pembuatan laporan keuangannya sudah sesuai mbak.⁶⁹

Pernyataan dari Ibu Faik dapat diketahui bahwa Ibu Faik selaku bendahara di BUMDesma Mayang Sejahtera sudah menerapkan prinsip integritas keuangan dalam proses penyusunan dan pembuatan laporan keuangannya. Laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara dan Sekretaris BUMDesma Mayang Sejahtera ini sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, hal ini dapat dilihat ketika ada kelompok SPP yang menyetorkan uang angsurannya kepada bendahara, maka bendahara akan mencatat uang masuk sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang di setorkan tersebut.

⁶⁹ Ilil Nurfadilah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2024.

Bendahara juga melakukan pencatatan transaksinya setiap hari, dan tidak ditumpuk, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan. Selain itu, bendahara dibantu oleh Sekretaris dalam penginputan nominal keuangan di format laporan keuangan yang sudah disediakan, dan juga ada pengawas yang mengaudit atau memeriksa laporan keuangannya. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sudah menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Bapak Danie selaku Direktur BUMDesma Mayang Sejahtera turut menjelaskan bahwa:

Ketika ada kuitansi uang masuk dan uang keluar, itu yang mencatat secara manual adalah bendahara. Sedangkan secara *software* nya atau komputernya itu yang mengerjakan adalah sekretaris. Ketika ada kesalahan, misalnya nominalnya salah dalam penulisan atau lainnya pasti akan langsung ketahuan karena sudah di kroscek ulang. Serta ada juga bukti transaksinya, sehingga apabila ada kesalahan dapat juga dilihat kembali dari bukti transaksinya atau kuitansinya. Jadi prinsipnya sudah saling mengontrol agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembuatan laporan keuangannya, serta laporan keuangan yang dihasilkan nantinya dapat dipertanggung jawabkan.⁷⁰

Penjelasan dari Bapak Danie selaras dengan pernyataan dari Ibu Faik, bahwa ketika ada kuitansi uang masuk dan uang keluar itu yang mencatat secara manual adalah bendahara. Sedangkan yang menginput nominal keuangan di *software* nya adalah sekretaris. Ketika proses pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh dua orang, maka kesalahan pencatatan dalam proses pembuatan laporan

⁷⁰ Danie Ardi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 Januari 2024.

keuangannya dapat diminimalisir. Karena ketika bendahara sudah membuat pembukuan secara manual, dan sekretaris yang menginput nominal keuangannya di format laporan keuangan, maka secara tidak langsung di kroscek oleh sekretaris. Sehingga apabila terdapat kesalahan penulisan nominal pasti akan langsung ketahuan. Selain itu, apabila hasil akhir dari laporan keuangannya tidak sama, maka akan diperiksa ulang dan juga bisa dilihat dari bukti transaksinya. Oleh karena itu, prinsipnya adalah saling mengontrol, supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses pembuatan laporan keuangannya, serta laporan keuangan yang dihasilkan nantinya dapat dipertanggung jawabkan.

Dari penjelasan sebelumnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu nasabah BUMDesma Mayang Sejahtera untuk memastikan keabsahan informasi. Ibu Elmi selaku nasabah BUMDesma Mayang Sejahtera dalam wawancaranya beliau mengatakan:

Dalam penyusunan laporan keuangannya saya rasa BUMDesma Mayang Sejahtera sudah baik dan mengikuti aturan mbak, karena kan pada akhir periode atau akhir tahun itu pasti diadakan MAD LPJ dimana didalam acara MAD LPJ tersebut pihak BUMDesma Mayang akan memaparkan hasil kinerja dan laporan keuangan yang mereka buat, termasuk saya juga turut hadir dalam acara MAD LPJ tersebut. Dan setiap saya setor uang pinjaman kelompok saya, pihak BUMDesma Mayang akan langsung mengisi buku laporan keuangannya tanpa menunda dan kita sebagai penyeter juga mendapatkan bukti tanda tangan di kartu pinjaman kelompok kami sebagai bukti bahwa kami telah melakukan setoran pada bulan itu.⁷¹

⁷¹ Elmi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 Januari 2024

Penjelasan dari Ibu Elmi dapat diketahui bahwa Pada akhir periode atau akhir tahun, BUMDesma Mayang Sejahtera mengadakan Musyawarah Antar Desa Laporan Pertanggungjawaban (MAD LPJ) di mana hasil kinerja dan laporan keuangan dipaparkan kepada para peserta, termasuk narasumber yang ikut hadir dalam acara tersebut. Dan Pada setiap kali dilakukan setoran uang pinjaman oleh kelompok, BUMDesma Mayang Sejahtera segera mencatatnya dalam buku laporan keuangan tanpa penundaan. Setiap penyettor menerima tanda tangan di kartu pinjaman kelompok sebagai bukti bahwa setoran telah dilakukan, yang menunjukkan adanya bukti tertulis dan terverifikasi untuk setiap transaksi. Secara keseluruhan, BUMDesma Mayang Sejahtera dalam penyusunan laporannya telah sesuai dengan salah satu prinsip akuntabilitas yaitu integritas keuangan dimana dalam hal ini pihak BUMDesma

Mayang Sejahtera sudah jujur dan apa adanya dalam menyusun laporan keuangan perusahaan.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa proses penyusunan dan pembuatan laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera sudah sesuai dengan prinsip integritas laporan keuangan. Hal ini dapat kita ketahui bahwa dalam melakukan kegiatan operasionalnya dan proses pembuatan laporan keuangannya, BUMDesma Mayang Sejahtera diawasi oleh dua pengawas. Selain itu, proses pencatatan keuangannya dilakukan

sesuai dengan transaksi atau apa adanya, bendahara dibantu oleh sekretaris dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangannya, serta format dalam pembuatan laporan keuangannya sudah mengikuti atau sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh dinas PMD. Dari hal tersebut, laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDesma Mayang Sejahtera dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan.

b. Pengungkapan

Pengungkapan merupakan proses penyampaian informasi keuangan yang relevan dan material kepada pemangku kepentingan. Konsep pengungkapan mewajibkan supaya laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode tertentu.⁷² Pengungkapan yang dilakukan perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

BUMDesma Mayang Sejahtera harus mengungkapkan laporan keuangannya kepada para pemangku kepentingan. Pengungkapan laporan keuangan ini dilakukan sebagai bukti bahwa BUMDesma Mayang Sejahtera telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan. Dengan kata lain, pengungkapan laporan keuangan ini sebagai bentuk akuntabilitas BUMDesma Mayang

⁷² Edowai, Abubakar, dan Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 28.

Sejahtera kepada pihak yang memiliki kewenangan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Abdul selaku Manajer Bumdesma Mayang Sejahtera. Dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa:

Untuk laporan keuangan kita berikan kepada dinas PMD dan seluruh kepala desa setiap bulannya. Sedangkan LPJ nya kita berikan ketika diadakan MAD. LPJ nya itu tidak hanya berisi laporan keuangannya saja mbak, melainkan ada laporan kegiatan operasional BUMDesmanya dan permasalahannya juga. Selain itu, laporan keuangan dan LPJ yang diserahkan sudah ada ttd dari badan pengawas, direktur, sama bendahara. Sehingga ttd tersebut membuktikan bahwa laporan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.⁷³

Pernyataan dari Bapak Abdul dapat kita ketahui bahwa BUMDesma Mayang Sejahtera memberikan laporan keuangan setiap bulannya kepada dinas PMD dan seluruh kepala desa di Kecamatan Mayang. Sedangkan untuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) diberikan ketika diadakan Musyawarah Antar Desa (MAD). Isi dari Laporan Pertanggung Jawabannya meliputi laporan keuangan, laporan kegiatan operasional BUMDesma Mayang Sejahtera, serta laporan permasalahan-permasalahan yang timbul selama melaksanakan kegiatan operasionalnya. Laporan yang diserahkan sudah terdapat tanda tangan dari badan pengawas, direktur, dan bendahara. Tanda tangan tersebut menunjukkan bahwa laporan yang diserahkan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

⁷³ Abdullah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 8 Januari 2024.

Pernyataan dari Bapak Abduh dipertegas oleh Ibu Faik selaku Sekretaris BUMDesma Mayang Sejahtera, beliau menjelaskan bahwa:

Kita memang diminta dinas PMD dan seluruh kepala desa untuk menyerahkan laporan keuangannya setiap bulannya mbak, dan penyerahan laporan keuangannya itu biasanya tanggal dua di bulan berikutnya. Jadi itu tidak boleh terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya, sehingga kita mempunyai *deadline* sendiri dalam menyerahkan laporan keuangannya. Untuk LPJ nya, kita serahkan ke dinas PMD nya pada awal bulan januari di tahun berikutnya. Hal itu dikarenakan kita membuat LPJ nya dalam waktu satu tahun itu, dan pada akhir tahun itu kan sudah tutup buku mbak, jadi kita perlu waktu untuk menyusun laporan tersebut. Sehingga terkait waktu pelaporan keuangannya, kita sudah sesuai aturan mbak, begitu.⁷⁴

Penjelasan dari Ibu Faik selaras dengan pernyataan dari Bapak Abduh, bahwa dalam setiap bulannya, laporan keuangan diberikan kepada dinas PMD dan seluruh kepala desa di Kecamatan Mayang, serta waktu untuk penyerahan laporan keuangannya adalah setiap tanggal dua di bulan berikutnya. Sedangkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) diserahkan kepada dinas PMD pada awal bulan januari di tahun berikutnya, karena LPJ ini berisi dengan laporan dalam waktu satu tahun, dan pada akhir tahun adalah waktu tutup buku. Sehingga pihak BUMDesma Mayang Sejahtera masih memerlukan waktu dalam menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) nya. Dari hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa BUMDesma Mayang Sejahtera dalam memberikan laporan keuangan dan LPJ nya

⁷⁴ Faikotul Alfiyah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Januari 2024.

sudah sesuai dengan ketentuan, yakni sudah sesuai dengan tanggal penyerahan laporan yang sudah ditetapkan.

Ibu Ilil selaku Bendahara di BUMDesma Mayang Sejahtera, turut menjelaskan bahwa:

Kita setiap tahun sekali mengadakan MAD mbak, dan saat MAD ini kita memberikan LPJ nya kita kepada orang yang hadir di sana. Sebelum diadakan MAD, LPJ nya kita serahkan dulu ke dinas PMD untuk menilai kinerja kita. Ketika waktu MAD diadakan, maka pihak dinas PMD akan mengevaluasi kinerja kita, dengan cara pihak dinas PMD akan menginformasikan kinerja yang kita lakukan selama satu tahun. Penyampaian informasi ini meliputi apakah target kinerja kita sudah terpenuhi atau tidak, apakah keadaan keuangannya kita ini sehat, apakah dalam pengelolaan keuangannya kita sudah sesuai dengan SK dinas, serta menyampaikan juga permasalahan-permasalahan yang muncul. Setelah itu, kita dan pihak lainnya akan berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, serta melakukan perencanaan baru lagi.⁷⁵

Penjelasan dari Ibu Ilil dapat kita ketahui bahwa BUMDesma Mayang Sejahtera mengadakan MAD (Musyawarah Antar Desa) setiap tahun sekali. Di forum MAD tersebut, pihak dinas PMD akan mengevaluasi kinerja yang dilakukan oleh BUMDesma Mayang Sejahtera selama satu tahun. Setelah melakukan evaluasi kinerja BUMDesma, pihak yang hadir di forum tersebut akan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada, serta melakukan perencanaan kinerja baru yang dipakai kedepannya.

Penjelasan Ibu Ilil diperjelas lagi oleh Bapak Danie selaku Direktur BUMdesma Mayang Sejahtera, beliau menjelaskan bahwa:

⁷⁵ Ilil Nurfadilah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2024.

MAD itu adalah forum yang diadakan BUMDesma Mayang Sejahtera dalam mengungkapkan laporan pertanggung jawaban. Forum ini terbuka untuk umum, jadi siapa saja yang ingin mengetahui LPJ BUMDesma bisa langsung datang saat MAD dilakukan. Biasanya pihak yang menghadiri MAD adalah seluruh kepala desa di Kecamatan Mayang, dinas PMD, tokoh masyarakat, puspika, dan masyarakat Kecamatan Mayang. Dengan mengadakan forum MAD, maka pihak-pihak desa atau pihak yang berkepentingan dapat mengetahui kinerja kita, serta itu bentuk tanggung jawabnya kita kepada publik.⁷⁶

Pernyataan dari Bapak Danie dapat kita ketahui bahwa MAD (Musyawarah Antar Desa) adalah forum yang diadakan BUMDesma Mayang Sejahtera dalam mengungkapkan laporan pertanggung jawaban. Forum ini terbuka untuk umum, jadi siapa saja yang ingin mengetahui laporan pertanggung jawaban BUMDesma Mayang, bisa datang langsung saat MAD diadakan. Pihak yang menghadiri MAD biasanya seluruh kepala desa di Kecamatan Mayang, dinas PMD, tokoh masyarakat, puspika, dan masyarakat Kecamatan Mayang. Pihak BUMDesma Mayang Sejahtera telah berpartisipasi, karena telah mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam forum MAD tersebut.⁷⁷ Forum MAD digunakan untuk mengevaluasi atau menjabarkan kinerja BUMDesma Mayang dalam waktu satu tahun. Sehingga dengan adanya forum ini, pihak-pihak desa atau pihak yang berkepentingan dapat mengetahui kinerja BUMDesma Mayang sejahtera dalam waktu satu tahun tersebut,

⁷⁶ Danie Ardi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 Januari 2024.

⁷⁷ Santi Kartika Sari dan Nurul Setianingrum, "Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember," (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021), 43.

serta pengadaan forum ini sebagai bentuk akuntabilitas BUMDesma Mayang Sejahtera kepada publik.

Ibu Elmi selaku nasabah BUMDesma Mayang Sejahtera juga menjelaskan bahwa:

Pengungkapan pihak BUMDesma Mayang Sejahtera dilakukan setiap tahun mbak di MAD LPJ itu, banyak pihak terkait yang menghadiri acara tersebut termasuk saya sebagai nasabah dan masyarakat di Kecamatan Mayang yang juga ingin mengetahui bagaimana kondisi keuangan dan bagaimana kinerja pihak BUMDesma Mayang Sejahtera selama ini.⁷⁸

Penjelasan Ibu Elmi dapat diketahui bahwa BUMDesma Mayang Sejahtera mengadakan acara MAD LPJ setiap tahun untuk mengungkapkan kondisi keuangan dan kinerjanya. Acara MAD LPJ dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk nasabah dan masyarakat di Kecamatan Mayang, yang menunjukkan keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDesma.

Pengungkapan yang dilakukan dalam acara MAD LPJ memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui secara langsung kondisi keuangan dan kinerja BUMDesma Mayang Sejahtera. Secara keseluruhan, hal ini merupakan bentuk pengungkapan BUMDesma Mayang Sejahtera kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Dari hasil wawancara di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa bentuk pengungkapan laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera terdiri dari dua hal, yaitu laporan keuangan setiap

⁷⁸ Elmi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 Januari 2024.

bulannya dilaporkan kepada dinas PMD dan seluruh kepala desa di Kecamatan Mayang. Sedangkan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) diberikan ketika diadakan MAD (Musyawarah Antar Desa). Selain itu, BUMDesma Mayang Sejahtera telah memberikan laporannya sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Dari hal tersebut, pihak BUMDesma Mayang Sejahtera sudah memberikan informasi terkait kinerjanya kepada para pemangku kepentingan. Pemberian informasi ini sebagai bentuk pertanggung jawaban BUMDesma Mayang Sejahtera dalam mengelola keuangan pemerintah, serta pengungkapan laporan tersebut dapat memberikan kepercayaan kepada pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, pihak yang berkepentingan akan percaya terkait kinerja yang telah dilakukan oleh BUMDesma Mayang Sejahtera, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kesan yang baik terhadap kinerja BUMDesma.

c. Ketaatan

Setiap lembaga harus mengikuti peraturan dalam proses pembuatan laporan keuangannya, karena setiap lembaga sudah menganut aturannya masing-masing yang sudah ditentukan oleh standar akuntansi keuangan.⁷⁹ Dengan mengikuti peraturan atau standar akuntansi dalam proses pembuatan laporan keuangannya, maka dapat mempermudah dalam proses penyusunan laporan keuangan, mempermudah auditor dalam membaca laporan

⁷⁹ Edowai, Abubakar, dan Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 28.

keuangannya, serta pembaca laporan keuangan dapat memahami dan membandingkan laporan keuangan dengan entitas yang berbeda. Selain itu, dalam mengelola BUMDesma harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, karena untuk memastikan legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. BUMDesma atau Badan Usaha Milik Desa Bersama sudah diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Abduh selaku Manajer BUMDesma Mayang Sejahtera, beliau menjelaskan bahwa:

BUMDesma diatur oleh PP Nomor 11 Tahun 2021. Dalam mengelola BUMDesma ini, kita harus mengikuti peraturan PP Nomor 11 Tahun 2021. Jadi yang dijadikan acuan dalam mengelola BUMDesma Mayang adalah peraturan tersebut mbak.⁸⁰

Pernyataan dari Bapak Abduh dapat kita ketahui bahwa BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) sudah diatur oleh PP Nomor 11 Tahun 2021. Sehingga dalam mengelola BUMDesma Mayang Sejahtera, harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Ibu Faik selaku Sekretaris BUMDesma Mayang Sejahtera menjelaskan bahwa:

Dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan kita sudah mengikuti standar dari dinas mbak. Jadi format laporan keuangan yang sudah tersedia di komputer itu sudah sesuai dengan standar dari dinas. Sehingga saya dalam pembuatan laporan keuangannya tinggal input nominal di format laporan keuangan tersebut.⁸¹

⁸⁰ Abdullah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 8 Januari 2024.

⁸¹ Faikotul Alfiah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Januari 2024.

Pernyataan dari Ibu Faik dapat kita ketahui bahwa proses penyusunan dan pembuatan laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera sudah sesuai dengan standar dari dinas PMD.

Penjelasan dari Ibu Faik selaras dengan Ibu Ilil selaku Bendahara BUMDesma Mayang Sejahtera, beliau mengatakan bahwa:

Karena kita setiap bulan melaporkan laporan keuangan kepada dinas PMD dan seluruh kepada desa di Kecamatan Mayang, maka laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan standar dari dinas PMD tersebut. Laporan keuangan yang kita buat tidak jauh berbeda, karena kita membuatnya setiap bulan. Selain itu, apabila laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan standar dari dinas, maka kita langsung mendapat teguran dari pihak dinas PMD nya mbak.⁸²

Pernyataan dari Ibu Ilil selaras dengan pernyataan Ibu Faik, bahwa dalam pembuatan laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera harus sesuai dengan standar dari dinas PMD. Karena pihak BUMDesma Mayang Sejahtera membuat laporannya setiap bulan, jadi laporan keuangan yang dibuat tidak akan jauh berbeda. Apabila laporannya tidak sesuai dengan standar dari dinas PMD, maka pihak BUMDesma Mayang Sejahtera akan mendapat teguran dari pihak dinas PMD.

Bapak Danie selaku Direktur BUMDesma Mayang Sejahtera turut menjelaskan bahwa:

Kita harus mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dalam mengelola BUMDesma Mayang ini. PP Nomor 11 Tahun 2021 mengatur tentang BUMDesma, seperti rencana

⁸² Ilil Nurfadilah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2024.

program kerja, kepemilikan modal, unit usaha yang akan dijalankan, pembagian hasil usaha, dan lain sebagainya. Karena BUMDesma ini transformasi dari PNPM, maka segala kegiatan BUMDesma ini harus sesuai dengan peraturan tersebut.⁸³

Penjelasan dari Bapak Danie dapat kita ketahui bahwa dalam mengelola BUMDesma Mayang Sejahtera harus sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021. PP Nomor 11 Tahun 2021 ini mengatur tentang BUMDesma yang dimulai dengan pendirian BUMDesma, rencana program kerja, kepemilikan modal, unit usaha, kerja sama dengan pihak lain, pembagia hasil usaha, dan lain sebagainya. Selain itu, BUMDesma Mayang Sejahtera transformasi dari PNPM, sehingga dalam pengelolaanya tidak harus sesuai dengan peraturan pemerintah tentang PNPM, melainkan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang terbaru tentang BUMDesma, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Dari hasil wawancara di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pihak pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera dalam mengelola BUMDesmanya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Sedangkan untuk penyusunan dan pembuatan laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh dinas PMD. Dari hal tersebut,

⁸³ Danie Ardi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 Januari 2024.

BUMDesma Mayang Sejahtera sudah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.⁸⁴

Di bawah ini terdapat lampiran laporan pertanggung jawaban atas laporan kegiatan operasional pada unit usaha SPP, BAPOKTING, dan ATK di BUMDesma Mayang Sejahtera pada tahun 2023:

Tabel 4.1
Laporan Operasional BUMDesma Mayang Sejahtera
Januari s/d Desember 2023

No	Unit Usaha	Jumlah Pendapatan (Rp)
1	SPP	1.139.322.057
2	BAPOKTING	3.500.000
3	ATK	1.265.718

2. Kendala dan Solusi dalam Penerapan Prinsip Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada BUMDesma Mayang Sejahtera

Kendala berarti halangan, rintangan, atau masalah yang menghambat atau menyulitkan tercapainya suatu tujuan atau penyelesaian suatu tugas. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas regulasi yang berubah-ubah, keterbatasan sumber daya, masalah integritas, keterbatasan teknologi dan sistem informasi, kurangnya transparansi, serta kualitas pengawasan dan audit yang kurang memadai. Kendala tersebut dapat menyebabkan informasi keuangan yang

⁸⁴ Retna Anggitaningsih, Wasilatur Rohma, dkk, "Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Keuangan untuk Pengelolaan Perjalanan Dinas Pada DPMD Kabupaten Jember," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara* 2, no. 1, (Maret 2024): 27.

dihasilkan tidak akurat, serta dapat merusak kepercayaan para pemangku kepentingan.⁸⁵ BUMDesma Mayang Sejahtera tidak menghadapi hambatan atau kendala dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangannya. Hal ini sesuai dengan wawancara Bapak Abdul selaku Manajer BUMDesa Mayang Sejahtera yang mengatakan bahwa:

Kalau penerapan prinsip akuntabilitas dalam pembuatan laporan keuangannya tidak ada mbak. Karena dalam mengelolanya kita sudah mengikuti peraturan pemerintah dan standar dari dinasnya. Ketika ada peraturan atau standar yang berubah, pasti pihak dinas PMD akan memberitahukan kepada kita kalau peraturan diganti yang terbaru gitu. Contohnya adalah kita kan dulunya PNPM, karena sudah ditransformasi, jadi kita disuruh mengikuti peraturan yang BUMDesmanya.⁸⁶

Penjelasan dari Bapak Abdul dapat kita ketahui bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pembuatan laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera tidak terdapat kendala. Karena dalam mengelola BUMDesma ini sudah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, dan juga sudah sesuai dengan standar dinas PMD dalam pembuatan laporan keuangannya. Selain itu, ketika ada regulasi atau peraturan yang terbaru, pasti pihak dinas PMD akan memberitahukan kepada pihak pengelola BUMDesma Mayang untuk mengikuti peraturan tersebut. Contohnya adalah BUMDesma Mayang ini bentuk transformasi dari PNPM, sehingga pihak pengelola BUMDesma Mayang harus mengikuti peraturan dari BUMDesma yang telah ditetapkan, bukan mengikuti peraturan PNPM lagi. Dengan adanya regulasi dan standar

⁸⁵ Suci Aprilia dan Elisa Susanti, "Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip *Good Village Governance* di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut," *BUDGETING: Journal of Business, Management, and Accounting* 5, no. 2 (Januari-Juni 2024): 967-969.

⁸⁶ Abdullah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 8 Januari 2024.

yang jelas, maka pihak BUMDesma Mayang tidak kesulitan dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Laporan keuangan yang dihasilkan nantinya dapat menjadi akurat dan akuntabel.

Ibu Faik selaku Sekretaris BUMDesma Mayang Sejahtera turut menjelaskan bahwa:

Pada waktu PNPM, usaha yang dijalankan adalah SPP saja mbak. Sedangkan pas sudah menjadi BUMDesma, unit usahanya bertambah dua, yaitu BAPOKTING sama ATK. Ketika PNPM juga, kita sudah digembleng untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sehingga untuk pencatatan SPP nya itu tidak jauh berbeda dengan pencatatan waktu menjadi PNPM, cuma yang berbeda pencatatannya itu di dua unit usaha itu karena baru. Kita memang tidak kesulitan dalam membuat laporannya itu mbak, apalagi sekarang di komputer sudah tersedia format laporan keuangan yang sesuai dengan standar dari dinas PMD. Jadi hal itu dapat mempermudah saya.⁸⁷

Penjelasan dari Ibu Faik dapat kita ketahui bahwa Ibu Faik tidak kesulitan dalam membuat laporan keuangan. Karena ketika menjadi PNPM, Ibu Faik digembleng untuk membuat laporan keuangan yang harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dari hal tersebut, Ibu Faik tidak kesulitan dalam pencatatan SPP nya, karena pencatatannya tidak jauh berbeda ketika PNPM. Selain itu, format penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dinas PMD sudah tersedia di komputer, sehingga Ibu Faik hanya tinggal menginput nominalnya saja di format laporan keuangan tersebut. Dengan tidak adanya keterbatasan

⁸⁷ Faikotul Alfiyah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Januari 2024.

sumber daya dan keterbatasan dalam teknologi, maka proses pembuatan dan pelaporan keuangan menjadi efisien dan akurat.

Ibu Ilil selaku Bendahara BUMDesma Mayang Sejahtera menyatakan bahwa:

Dalam proses pembuatan laporan keuangannya kita sudah jujur dan apa adanya, yakni pencatatannya sesuai kuitansi uang masuk dan uang keluar itu mbak. Serta dalam pembuatan laporan keuangannya saya juga dibantu sekretaris dalam penginputan nominal keuangan di format laporannya mbak. Selain itu, kita juga diawasi oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Jadi laporan keuangan yang kita buat sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya mbak.⁸⁸

Penjelasan dari Ibu Ilil dapat kita ketahui bahwa dalam proses pembuatan laporan keuangan di BUMDesma Mayang sudah jujur dan apa adanya, karena dalam pencatatannya sudah sesuai dengan kuitansi uang masuk dan uang keluar. Bendahara juga dibantu oleh sekretaris dalam penginputan nominal keuangan di format laporan keuangan yang sudah tersedia, sehingga hal tersebut bisa dikroscek oleh sekretaris dan meminimalisir kesalahan pencatatan. Serta pihak pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera dalam bekerja sudah diawasi oleh pengawas internal dan pengawas eksternal atau auditor. Dari hal tersebut, laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDesma Mayang Sejahtera sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak ada unsur manipulasi. Jadi, pihak pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pembuatan laporan keuangannya.

⁸⁸Ilil Nurfadilah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2024.

Bapak Danie selaku Direktur BUMDesma Mayang Sejahtera turut menambahkan bahwa:

Dalam mengungkapkan LPJ, kita mengadakan forum MAD itu mbak. Forum ini terbuka untuk umum, jadi siapa saja boleh hadir. Serta dari forum ini juga kita bisa menunjukkan kinerja kita kepada publik.⁸⁹

Penjelasan dari Bapak Danie dapat kita ketahui bahwa BUMDesma Mayang Sejahtera mengadakan forum MAD untuk mengungkapkan laporan pertanggung jawabannya. Forum MAD terbuka untuk umum, jadi siapa saja yang ingin mengetahui laporan keuangan dan laporan kinerja BUMDesma Mayang selama satu tahun bisa datang langsung saat MAD diadakan.⁹⁰ Selain itu, dengan mengadakan forum ini, BUMDesma Mayang Sejahtera dapat menunjukkan kinerja mereka kepada publik.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini dijelaskan temuan terkait penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan pada BUMDesma mayang sejahtera di Kecamatan Mayang Jember. Penulis mengulas hubungan antara data lapangan dengan teori yang relevan. Pembahasan diuraikan secara terperinci sesuai dengan fokus masalah yang telah ditetapkan.

⁸⁹ Danie Ardi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 Januari 2024.

⁹⁰ Erna Puspitasari, Nur Ika Mauliyah, dan Anam Miftakhul Huda, "Mewujudkan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa," *Wacana Equilibrium: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi* 7, no. 01 (26 Juni 2019): 23.

1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera

Mardiasmo mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.⁹¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pihak pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera sudah baik dalam memahami akuntabilitas. Seperti yang sudah dijelaskan oleh beberapa pihak pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera, yang menyatakan bahwa segala aktivitas atau kegiatan dalam menjalankan BUMDesma Mayang Sejahtera adalah tanggung jawabnya. Pihak pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera membuat laporan keuangan setiap bulan dan laporan pertanggung jawaban sebagai bentuk akuntabilitasnya kepada pihak yang memberi amanah.⁹² Selain itu, pihak BUMDesma Mayang Sejahtera mengadakan forum MAD untuk mengungkapkan isi laporan pertanggung jawabannya kepada publik. Sehingga pembuatan laporan dan pengadaan MAD tersebut sebagai bentuk penyampaian informasi terkait kinerja yang telah dilakukan oleh pihak pengelola BUMDesma Mayang

⁹¹ Edowai, Abubakar, dan Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 16.

⁹² Nikmatul Masruroh, Samsul Arifin, dkk, "Peningkatan Integritas Melalui Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2. no. 2 (September 2023): 14-15.

Sejahtera. Sehingga hal tersebut sesuai dengan konsep teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fani Hidayatulloh dengan judul “Akuntabilitas dan Tranparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertanggung jawaban karyawan atas kinerjanya biasanya dilakukan dengan pembuatan laporan keuangan, serta mengungkapkan isi laporan keuangan tersebut kepada publik melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Maka dari itu, prinsip akuntabilitas sudah diterapkan di Desa Kemiri dalam mengelola dana desanya.⁹³

Akuntabilitas finansial adalah pertanggung jawaban lembaga publik dalam menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif, serta tidak ada pemborosan dana dan korupsi. Akuntabilitas finansial akan terpenuhi apabila laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan indikator atau pengukuran dari akuntabilitas finansialnya sendiri. Indikator dari akuntabilitas finansial meliputi integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan.⁹⁴

⁹³ Fani Hidayatulloh, “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 102.

⁹⁴ Edowai, Abubakar, dan Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 28.

a. Integritas Keuangan

Integritas keuangan berarti laporan keuangan yang dibuat harus menampilkan kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.⁹⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, BUMDesma Mayang Sejahtera diawasi oleh dua pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional dan proses pembuatan laporan keuangannya. Pencatatan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan transaksi aktual, serta bendahara dibantu oleh sekretaris dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasiati dengan judul “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan pada BUMDesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BUMDesma Sejahtera Mandiri sudah menyajikan laporan keuangan secara jujur dan benar, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹⁶

⁹⁵ Edowai, Abubakar, dan Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 28.

⁹⁶ Lasiati, “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Pada BUMDesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2021), 80.

b. Pengungkapan

Pengungkapan berarti proses penyampaian informasi keuangan yang relevan dan material kepada pemangku kepentingan. Konsep pengungkapan mewajibkan supaya laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode tertentu.⁹⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pengungkapan laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera terdiri dari dua hal, yaitu laporan keuangan setiap bulannya dilaporkan kepada dinas PMD dan seluruh kepala desa di Kecamatan Mayang. Sedangkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di untkapkan ketika MAD (Musyawarah Antar Desa) diadakan. Selain itu, BUMDesma Mayang Sejahtera dalam menyampaikan laporannya sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Pihak BUMDesma Mayang Sejahtera sudah memberikan informasi terkait kinerjanya kepada para pemangku kepentingan. Pemberian informasi ini sebagai bentuk pertanggung jawaban BUMDesma Mayang Sejahtera dalam mengelola keuangan pemerintah, serta pengungkapan laporan tersebut dapat memberikan kepercayaan kepada pihak pemangku kepentingan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasiati dengan judul “Penerapan Prinsip

⁹⁷ Edowai, Abubakar, dan Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 28.

Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan pada BUMDesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BUMDesma Sejahtera Mandiri sudah mengungkapkan laporan pertanggung jawabannya ketika MAD (Musyawarah Antar Desa) diadakan.⁹⁸

c. Ketaatan

Setiap lembaga harus mengikuti peraturan dalam proses pembuatan laporan keuangannya, karena setiap lembaga sudah menganut aturannya masing-masing yang sudah ditentukan oleh standar akuntansi keuangan.⁹⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pihak pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera dalam mengelola BUMDesmanya sudah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Sedangkan untuk penyusunan dan pembuatan laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh dinas PMD. Dari hal tersebut, BUMDesma Mayang Sejahtera sudah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasiati dengan judul “Penerapan Prinsip

⁹⁸ Lasiati, “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Pada BUMDesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2021), 80.

⁹⁹ Edowai, Abubakar, dan Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 28.

Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan pada BUMDesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan operasional dan laporan keuangan pada BUMDesma Sejahtera Mandiri sudah sesuai dengan UU No 4 tahun 2015.¹⁰⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pihak BUMDesma Mayang Sejahtera sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas finansial. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera sudah bertanggung jawab dalam mengelola dana pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Mayang. Dengan demikian, pihak BUMDesma Mayang Sejahtera telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam laporannya.

2. Kendala dan Solusi dalam Penerapan Prinsip Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada BUMDesma Mayang Sejahtera

Kendala berarti halangan, rintangan, atau masalah yang menghambat atau menyulitkan tercapainya suatu tujuan atau penyelesaian suatu tugas. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas regulasi yang berubah-ubah, keterbatasan sumber daya, masalah integritas, keterbatasan teknologi dan sistem informasi, kurangnya

¹⁰⁰ Lasiati, “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Pada BUMDesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2021), 80.

transparansi, serta kualitas pengawasan dan audit yang kurang memadai. Kendala tersebut dapat menyebabkan informasi keuangan yang dihasilkan tidak akurat, serta dapat merusak kepercayaan para pemangku kepentingan.¹⁰¹

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menjelaskan ke dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Analisis Kendala dalam Penerapan Akuntabilitas Pada Laporan Keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera

No	Kendala	BUMDesma Mayang Sejahtera	Hasil Analisis
1	Regulasi yang berubah-ubah	BUMDesma Mayang Sejahtera sudah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, dan juga sudah sesuai dengan standar dari dinas PMD dalam pembuatan laporan keuangannya. Selain itu, ketika ada regulasi atau peraturan yang terbaru, pasti pihak dinas PMD akan memberitahukan kepada pihak pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera untuk mengikuti peraturan tersebut.	Tidak terdapat kendala
2	Keterbatasan Sumber Daya	Staff pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera adalah staff yang sama ketika menjadi PNPM. Jadi ketika PNPM sudah digembleng untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sehingga untuk pencatatan SPP nya itu tidak jauh berbeda dengan pencatatan waktu menjadi PNPM, cuma yang berbeda pencatatannya itu di dua unit usaha itu karena baru. Staff pengelola BUMDesma Mayang Sejahtera sudah memiliki	Tidak terdapat kendala

¹⁰¹ Suci Aprilia dan Elisa Susanti, "Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip *Good Village Governance* di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut," *BUDGETING: Journal of Business, Management, and Accounting* 5, no. 2 (Januari-Juni 2024): 967-969.

No	Kendala	BUMDesma Mayang Sejahtera	Hasil Analisis
		<p>pengetahuan dan keterampilan dalam hal akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, rata-rata pendidikan staff pengelola BUMDesma Mayang adalah S1/Sarjana. Berdasarkan hal tersebut, sumber daya di BUMDesma Mayang Sejahtera tidak mengalami keterbatasan.</p>	
3	Masalah Integritas	<p>Laporan keuangan yang dibuat BUMDesma Mayang Sejahtera sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan pencatatan keuangannya sudah dilakukan sesuai dengan transaksi aktual, kegiatan operasional dan penyusunan laporan keuangan diawasi oleh dua pengawas, serta bendahara dibantu oleh sekretaris dalam penyusunan laporan keuangan.</p>	Tidak terdapat kendala
4	Keterbatasan Teknologi dan Sistem Informasi	<p>Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, sekretaris BUMDesma Mayang tinggal menginput nominal keuangan di format laporan keuangan yang telah tersedia di komputer. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDesma Mayang Sejahtera memiliki teknologi dan sistem informasi yang baik, sehingga proses penyusunan laporan keuangannya menjadi efisien dan akurat</p>	Tidak terdapat kendala
5	Kurangnya Transparansi	<p>BUMDesma Mayang Sejahtera mengadakan forum MAD untuk mengungkapkan laporan pertanggung jawabannya. Forum MAD ini terbuka untuk umum, jadi siapa saja yang ingin mengetahui laporan keuangan dan laporan kinerja BUMDesma Mayang selama satu tahun, bisa datang langsung saat MAD diadakan. Sehingga hal tersebut menunjukkan</p>	Tidak terdapat kendala

No	Kendala	BUMDesma Mayang Sejahtera	Hasil Analisis
		bahwa BUMDesma Mayang Sejahtera sudah transparansi, karena laporan keuangannya sudah diungkapkan ke publik.	
6	Kualitas pengawasan dan audit yang kurang memadai	Dalam melaksanakan kegiatan operasional dan penyusunan laporan keuangan, pihak pengelola diawasi oleh dua pengawas, yaitu pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawas internal adalah badan pengawas dari BUMDesma Mayangnya sendiri. Tugas pengawas internal adalah untuk mengawasi dan mengaudit kinerja UPK setiap bulannya. Sedangkan untuk pengawas luarnya atau auditor eksternalnya adalah BPKP, yang tugasnya adalah untuk memantau dan memeriksa keuangan serta administrasi BUMDesma Mayang Sejahtera. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengawasan dan audit di BUMDesma Mayang Sejahtera sudah memadai.	Tidak terdapat kendala

Sumber: Data diolah oleh peneliti.

Berdasarkan penjelasan tabel analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa BUMDesma Mayang Sejahtera tidak mengalami kendala dalam menerapkan prinsip akuntabilitas pada laporan keuangannya.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kadek Rindi, dkk dengan judul “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam menerapkan prinsip akuntabilitas di

BUMDes Teja Kusuma. Kendala tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dan keterbatasan alat.¹⁰²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰² Kadek Rindi, Luh Putu Mas Sintia Arsani Dewi dkk, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 7, no. 1 (April 2017): 3-4.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Pada BUMDesma Mayang Sejahtera di Kecamatan Mayang Jember,” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera dilakukan dengan menggunakan 3 indikator dari akuntabilitas finansial, diantaranya integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan. Laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDesma Mayang Sejahtera sudah sesuai dengan ketiga indikator akuntabilitas finansial. Maksudnya adalah laporan keuangan yang dibuat BUMDesma Mayang Sejahtera sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya, laporan pertanggung jawaban yang berisi laporan keuangan dan laporan kegiatan operasional dalam satu tahun sudah diungkapkan ke publik melalui forum MAD, serta laporan keuangan yang dibuat sudah mengikuti standar dari dinas PMD. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa BUMDesma Mayang Sejahtera sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam laporannya.
2. BUMDesma Mayang Sejahtera tidak mengalami kendala atau hambatan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas pada laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan BUMDesma Mayang Sejahtera sudah mematuhi

peraturan yang berlaku atau peraturan yang terbaru, BUMDesma Mayang Sejahtera tidak mengalami keterbatasan sumber daya, format penyusunan laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar dari dinas PMD yang sudah tersedia di komputer, sehingga teknologi di BUMDesma Mayang tidak terbatas, laporan keuangan yang dibuat sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya, laporan pertanggung jawaban sudah diungkapkan ke publik, serta BUMDesma Mayang Sejahtera sudah diawasi oleh dua pengawas dalam melakukan kerjanya.

B. Saran

1. Pihak BUMDesma Mayang Sejahtera perlu meningkatkan strategi penjualan ATK nya untuk mencapai target pemasukan yang lebih tinggi, serta untuk memastikan keberlanjutan unit usaha.
2. Pihak BUMDesma Mayang Sejahtera harus mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan tunggakan di unit usaha SPP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Afkarina, Sahila Izza. "Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid Baitul Muttaqin Dusun Seloagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.
- Afni, Nurul dkk. "Penerapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan." *YUME: Journal of Management* 7, no. 1 (2024): 402-406.
- Ahsanulhaq, Moh. "Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan." *Jurnal Prakarsa Paedagogia* 2, no.1 (2019), 27.
- Ana, Angelina Trimurti Rambu dan Linda Lomi Ga. "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk)." *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas* 9, no. 1 (Maret 2021): 69-71.
- Aini, Rukyatul. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 di Masjid Baytul Amal Gebang Panti Jember." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.
- Amelia, Neneng Musyrifatul dan Muhammad Taufiq Hidayat. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo." *JAKA: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing* 5, no. 1 (Mei 2024): 89-93.
- Anggitaningsih, Retna, Wasilatur Rohma, dkk. "Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Keuangan untuk Pengelolaan Perjalanan Dinas Pada DPMD Kabupaten Jember." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara* 2, no. 1, (Maret 2024): 27.
- Anggraini, Dewi. "Analisis Pengawasan Sistem Pengajaran di Edu Smart Learning Center Medan." *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen* 7, no.1 (2019): 26.
- Anggraeni, Novi. "Analisis Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023)." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.
- Anjilni, Ratih Qadarti, Asih Handayani, dan Adhitya Putri Pratiwi Pratiwi. *Akuntansi Sektor Publik*. 2023.
- Aprilia, Suci dan Elisa Susanti. "Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip *Good Village Governance* di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut." *BUDGETING: Journal of Business, Management, and Accounting* 5, no. 2 (Januari-Juni 2024): 967-969.

- Apriliany, Nabilla, Cantik Prameswari, dan Dra Kushandajani. "Analisis Badan Usaha Milik Desa Bersama Dalam Perspektif Good Governance (Studi Kasus Bumdesma Mandiri Sejahtera Pati)." *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 3 (2022): 5.
- Aziiz, Muhammad Nur. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa." *Jurnal Akuntansi Aktual* 6, no. 2 (2019): 334.
- Basri, Muhammad dkk. "Nilai-Nilai Sejarah Berbasis Local Wisdom Situs Batu Berak Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah." *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* 5, no.2 (2020):127.
- Edowai, Mikael, Herminawati Abubakar, and Miah Said. *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sulawesi Selatan: ISBN, 2021).
- Fahmi, Irham. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: ALFABETA, 2017.
- Fiantika, Feny Rita dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hidayatulloh, Fani. "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.
- Hidayat, Wastam Wahyu. *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Mushaf Al-Fattah dan Terjemahannya*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011.
- Kurniawan, Badrudin. "Implementasi Kebijakan Kerjasama Antar Desa di Badan Usaha Milik Desa Bersama (Studi Kasus BUMDesma Kampung Batik di Desa Klampar Kecamatan Propo Kab. Pamekasan)." *Parlindungan Arief Nasution Publika* 11, no. 2 (2023): 1916.
- Lasiati. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Pada BUMDesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk." Skripsi, IAIN Tulungagung, 2021.
- Nengsih, Widya, Fachri Adnan, dan Fitri Eriyanti. "Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 2, no. 1 (2019): 4.
- Mahmudi. *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2021.
- Mais, Rimi Gusliana dan Lini Palindri. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa." *Jurnal Akuntansi Dan Governance* 1, no.1 (2020): 57.

- Masruroh, Nikmatul, Samsul Arifin, dkk. "Peningkatan Integritas Melalui Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2. no. 2 (September 2023): 14-15.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Ichsan. "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no.1 (2019): 4.
- Musyadad, Vina Febiani dkk. "Supervisi Akademik untuk Meningkatkan Motivasi Kerja Guru dalam Membuat Perangkat Pembelajaran." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no.6 (2022): 1936.
- Osin, Rosvita Flaviana, Ni Putu Widhya Pibriari, dan I Wayan Agus Anggayana. "Memaksimalkan Pelayanan Wisata Spa di Kabupaten Badung dalam Usaha yang Dijalankan Oleh Perempuan Bali." *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata* 15, no.1 (2020), 41.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Puspitasari, Erna, Nur Ika Mauliyah, dan Anam Miftakhul Huda. "Mewujudkan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa." *Wacana Equilibrium: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi* 7, no. 01 (26 Juni 2019): 23.
- Rindi, Kadek, Luh Putu Mas Sintia Arsani Dewi dkk. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 7, no. 1 (April 2017): 3-4.
- Rohma, Arrofatur dan Chamdan Purnama. *Pengaruh Komponen Laba Rugi Dalam Memprediksi Laba Masa Depan Pada Perusahaan Retail Trade*. Mojokerto: Darmawiyata, 2020.
- Rumambi, Hedy Desiree dkk. *Penyusunan Laporan Keuangan UMKM*. Sulawesi Utara: Polimbo Press, 2019.
- Saputra, Angelina Nadia dkk. "Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan di Bumdes Maskumambang." *Jurnal Pilar* 1, no. 2 (2023): 227-230.
- Sari, Meita Sekar dan Muhammad Zefri. "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura." *Jurnal Ekonomi* 2, no. 1 (2019): 309.
- Sari, Santi Kartika dan Nurul Setianingrum. "Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021.
- Sari, Shinta Maulydia. "Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Bumdes (Studi Kasus BUMDES KARYA

MULYA Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang).” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes/BUMDesma.

Seto, Agung Anggoro Seto dkk. *Analisis Laporan Keuangan*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Setyanti, Maryunani dan Axellina Muara. *Ekonomi Perdesaan*. Malang: UB Press, 2020.

Sufyati, dkk. *Analisis Laporan Keuangan*. Cirebon: Penerbit Insania, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Pada BUMDesma Mayang Sejahtera di Kecamatan Mayang Jember.	1. Teori Agensi	Hubungan atau kontrak antara <i>principal</i> dan <i>agent</i> , dimana <i>principal</i> adalah pihak yang memperkerjakan <i>agent</i> agar melakukan tugas untuk kepentingan <i>principal</i> , sedangkan <i>agent</i> adalah pihak yang menjalankan kepentingan <i>principal</i> .	1. Informan: a. Direktur BUMDesma Mayang Sejahtera. b. Manajer BUMDesma Mayang Sejahtera. c. Sekretaris BUMDesma Mayang Sejahtera. d. Bendaha BUMDesma Mayang Sejahtera.	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif. 2. Lokasi Penelitian: BUMDesma Mayang Sejahtera. 3. Teknik Pengumpulan Subyek Penelitian: <i>Purposive Sampling</i> .	1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera? 2. Apa kendala dan solusi dalam penerapan prinsip akuntabilitas laporan keuangan pada BUMDesma Mayang Sejahtera?
	2. Akuntabilitas	a. Integritas Keuangan. b. Pengungkapan. c. Ketaatan.	2. Kepustakaan: a. Buku b. Jurnal c. Artikel d. Skripsi	4. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi. b. Wawancara. c. Dokumentasi.	
	3. Laporan Keuangan	a. Neraca b. Laporan laba rugi. c. Laporan arus kas. d. Laporan perubahan modal. e. CALK.		5. Teknik Analisis Data: a. Pengumpulan Data. b. Kondensasi Data. c. Penyajian Data. d. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan. 6. Keabsahan Data: a. Triangulasi Sumber.	

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fera Irawati

Nim : 204105030118

Prodi Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Pada BUMDesma Mayang Sejahtera di Kecamatan Mayang Jember”** Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 26 Mei 2024



Fera Irawati

NIM. 204105030118



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1974 /Un.22/7.a/PP.00.9/11/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

06 November 2023

Kepada Yth.
Ketua BUMDESMA Mayang Sejahtera
Jl. Pahlawan, Krajan, Tegal Rejo, Mayang, Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Fera Irawati
NIM : 204105030118
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Pada BUMDESMA Mayang Sejahtera di Kecamatan Mayang di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wakil Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu



BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

“ BUMDESMA MAYANG SEJAHTERA ”

SK. MENKUMHAM NOMOR : AHU-00074.AH.01.35.TAHUN 2023

DUSUN KRAJAN DESA TEGALREJO KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER

Sekretariat : Jl. Pahlawan No.01 Krajan RT.001/ RW.002 Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kode Post 68182 Kabupaten Jember
Tlp/ WA. 085101848885 - 085103411851 - 085330782042

SURAT KETERANGAN

NO. 012/BUMDESMA.MS/III/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama : DENIE ARDI
NIK : 3509241510770001
Temp. Tgl. Lahir : Jember, 15 Oktober 1977
Alamat : Dsn. Klayu RT.001/RW.007 Desa Mayang Kec.Mayang
Jabatan : Direktur

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Fera Irawati
NIM : 204105030118
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Dsn. Tegalgusi RT.002/RW.006 Desa Mayang Kec. Mayang

Telah selesai melakukan penelitian skripsi sejak tanggal 08 Januari sampai 11 Januari 2024 dengan judul **“Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Pada BUMDESMA Mayang Sejahtera Di Kecamatan Mayang Jember”**.

Jember, 27 Maret 2024

Direktur

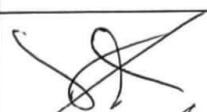

BUMDESMA
DENIE ARDI, ST

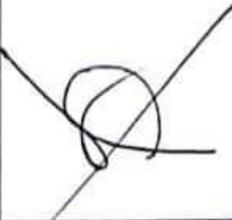
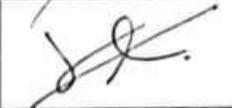
JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

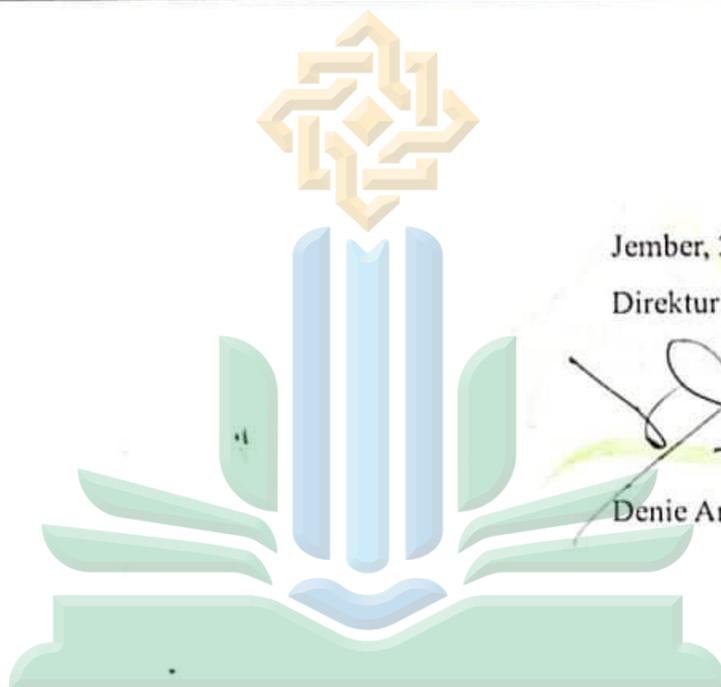
Nama : Fera Irawati

Nim : 204105030118

Judul : Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Pada BUMDesma Mayang Sejahtera di Kecamatan Mayang Jember.

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Senin, 18 Desember 2023	Melakukan observasi dan meminta izin untuk melakukan penelitian.	
2	Rabu, 20 Desember 2023	Memberikan surat izin penelitian.	
3	Senin, 8 Januari 2024	Wawancara dengan Bapak Abdullah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera.	
4	Selasa, 9 Januari 2024	Wawancara dengan Ibu Faikotul Alfiah mengenai profil, Sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, unit usaha, dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera.	
5	Rabu, 10 Januari 2024	Wawancara dengan Ibu Ilil Nurfadilah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera.	
6	Kamis, 11 Januari	Wawancara dengan Bapak Denie Ardi	

	2024	mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan di BUMDesma Mayang Sejahtera.	
7	Rabu, 27 Maret 2024	Mengambil surat keterangan selesai penelitian	



Jember, 28 Maret 2024

Direktur BUMDesma,



Denie Ardi, ST.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Dokumentasi observasi BUMDesma Mayang Sejahtera



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Abdullah selaku Manajer BUMDesma Mayang Sejahtera

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E B E R



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Faikotul Alfiah selaku Sekretaris BUMDesma Mayang Sejahtera



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Ilil Nurfadilah selaku Bendahara BUMDesma Mayang Sejahtera



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Denie Ardi selaku Direktur BUMDesma Mayang Sejahtera

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ



Dokumentasi unit usaha ATK di BUMDesma Mayang Sejahtera



Dokumentasi unit usaha Sembako di BUMDesma Mayang Sejahtera



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Fera Irawati
NIM : 204105030118
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Pada BUMDesma Mayang Sejahtera di Kecamatan Mayang Jember.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jember, 29 Mei 2024
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

(Mariyah Ulfa, M.E.I)
NIP. 197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Fera Irawati
NIM : 204105030118
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 20 Mei 2024

Plt. Koordinator Prodi Akuntansi Syariah



Nadia Azalia Putri, M.M.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



Nama : Fera Irawati

NIM : 204105030118

Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 18 Desember 2001

Alamat : Dusun Tegal Gusi, RT/RW: 02/006, Desa Mayang, Kecamatan Mayang,
Kabupaten Jember.

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Akuntansi Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

No Telepon : +6288235593100

Riwayat Pendidikan:

1. TK Darun Najjah : Tahun 2007-2009
2. SDN Mrawan 1 : Tahun 2009-2014
3. SMPN 2 Mayang : Tahun 2014-2017
4. SMKN 1 Jember : Tahun 2017-2020